KEINGINAN MENCEGAH *FRAUD* PADA PENGGUNAAN DANA DESA

TESIS

Diajukan Oleh

Nurul Amalia, S.E.

18919027

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam karya ilmiah Tesis ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang dan atau lembaga lain, kecuali yang secara tertulis dalam tesis ini. Dengan demikian, saya menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas dari unsur-unsur plagiarisme dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku "

Yogyakarta, 16 November 2020

Nurul Amalia

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, 16 November 2020

Telah diterima dan disetujui dengan

baik oleh : Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

NURUL AMALIA
No. Mhs. : 18919027
Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:
KEINGINAN MENCEGAH FRAUD PADA PENGGUNAAN DANA DESA

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.	Dr. Kumalahadi, MS., Ak.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Akuntansi,

Drs. Dekar Urumsah, SSi.,M.Com.,Ph.D.,CfrA.

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan izin dan kuasa-NYA tesis ini yang berjudul "Keinginan mencegah *fraud* pada pengunaan dana desa" dapat diselesaikan. Tesis ini disusun guna memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Adapun selama penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi dan kesabaran yang diberikan sejak awal penyusunan tesis sampai dengan penyelesaian tesis ini.
2. Dr. Kumala Hadi, MBA selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan saran serta masukan kepada penulis demi untuk keberhasilan tesis ini.
3. Prof. Dr Jaka Sriyana, SE., Msi selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada penulis hingga dapat menimba ilmu.
4. Pak Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CfrA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

5. Seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis dan rekan-rekan Magister Akuntansi angkatan 17. Suatu kesempatan luar biasa dapat bertemu dan diajarkan oleh dosen-dosen terbaik yang dengan ikhlas memberikan ilmu, pengetahuan dan *skill*nya kepada kami.
6. Seluruh staff admisi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran proses akademik dan administrasi selama menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Soleman Asnath dan Ibu Siswati Ariadi yang tidak pernah berhenti memberikan perhatian, dukungan, dan doa untuk keberhasilan penulis.
8. Teman-teman seperjuangan di Magister Akuntansi angkatan 17, suatu keberuntungan dan kebanggaan bagi penulis telah dipertemukan dengan orang-orang hebat seperti kalian.
9. Keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam proses pengambilan data untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Seluruh aparatur pemerintah desa di kantor desa Kabupaten Tidore Kepulauan, Kecamatan Oba, Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba Tengah, Maluku Utara yang menjadi responden dalam penelitian ini, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian.

Seluruh pihak yang tidak disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan hingga tesis ini dapat terselesaikan. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan juga hidayah kepada bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian.

Tesis ini tentu saja jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan bagi siapa saja yang membaca tesis ini. Namun sesederhana dan sekecil apapun penulis harap tesis ini dapat memberikan manfaat.bagi kita semua, terutama untuk pengembangan akuntansi kedepannya.

Yogyakarta, Oktober 2020

Penulis

Nurul Amalia

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Tujuaan Penelitian 9
1.4. Manfaat penelitian 10
BAB II 12
KAJIAN PUSTAKA 12
2.1. Landasan Teori 12
2.1.1. Kecurangan (*Fraud*) 12
2.1.2. Pencegahan Kecurangan (*Fraud Preventing*) 13
2.1.3. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) 17
2.1.4. Teori Institusional (*Institutional Theory*) 19
2.1.5. Kesadaran Diri (*Self Awareness*) 21
2.1.6. Fraud Triangle 22
2.1.7. Perkembangan dan Kondisi Desa 24
2.1.8. Alokasi Dana Desa 26
2.2. Literature Review 27
2.3. Hipotesis Penelitian 34
2.3.1. Pengaruh Sikap (*Attitude Toward Behaviour*) Terhadap Keinginan Mencegah *Fraud* 34
2.3.2. Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control)* Terhadap Keinginan Mencegah *Fraud* 35
2.3.3. Pengaruh Tekanan Coercive (*Coercive Pressure*) terhadap Keinginan Untuk Mencegah *Fraud* 36
2.3.4. Pengaruh Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*) dan terhadap Keinginan Mencegah *Fraud* 37
2.3.5. Pengaruh Tekanan Normatif (*Normaveti Pressure*) terhadap Keinginan Mencegah *Fraud* 38
2.3.6. Pengaruh Kesadaran Diri (*Self Awareness*) terhadap Keinginan Mencegah *Fraud* 40
2.4. Kerangka Penelitian 41
BAB III 42

METODE PENELITIAN 42
3.1. Populasi dan Sampel 42
3.2. Jenis dan Sumber Data 43
3.3. Teknik dan Pengumpulan Data 43
3.4. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 44
3.5. Pengukuran Variabel Penelitian 47
3.6. Teknik Analisa Data 48
3.6.1. Uji Kualitas Data 49
3.6.2. Uji Hipotesis 50
BAB IV 52
DATA DAN PEMBAHASAN 52
4.1. Hasil Pengumpulan Data 53
4.2. Deskripsi Responden 54
4.3. Hasil Pengujian 55
4.4. Pembahasan 65
BAB V 74
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 74
5.1. Kesimpulan 74
5.2. Implikasi 75
5.3. Saran 77
5.4. Keterbatasan Penelitian 77
Daftar Pustaka 78
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Pengukuran Variabel Penelitian 47
Tabel 4. 1. Hasil Pengumpulan Data 53
Tabel 4. 2. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 54
Tabel 4. 3. Data Responden Berdasarkan Usia 54
Tabel 4. 4. Data Responden Berdasarkan Pengalaman Bekerja 55
Tabel 4. 5. Nilai *Outer Loading* dan *Averege Varience Expected* (AVE) Awal ... 55
Tabel 4. 6. *Outer Loading* dan *Average Variance Extracted* (AVE) Akhir 57
Tabel 4. 7. Nilai *Cross Loading* 58
Tabel 4. 8. Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* 59
Tabel 4. 9. Hasil Uji Signifikansi 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Teori Perilaku Terencana (*Theory Plann Behavior*) 18
Gambar 2. 2. *Fraud Triangle* 23
Gambar 2. 3. Kerangka Penelitian 41

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melihat keinginan aparatur pemerintah desa dalam mencegah tindakan *fraud* pada penggunaan dana desa berdasarkan pendekatan Teori Perilaku Terencana, Teori Institusional dan Kesadaran Diri. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh total sebanyak 205 responden yang merupakan aparatur pemerintah desa di Maluku Utara. Data dianalisis dengan metode kuantitatif deskriptif dan kemudian diuji dengan menggunakan structural equation model (SEM)-partial least square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kontrol perilaku presepsian, tekanan mimetik, tekanan normatif, dan kesadaran diri konsisten berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa sementara Sikap, dan tekanan koersif tidak konsisten berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.

Kata Kunci : Pencegahan Kecurangan (*Fraud*), *Fraud,* Teori Institusional, Teori Perilaku Terencana, Kesadaran Diri, Dana Desa

Abstract

This research aimed to know the desire of a village government apparatus in preventing fraud to the village fund using the Theory of planned behavior, Institutional Theory, and Self-Awareness Theory. Research sample determined using purposive sampling method and 205 respondents, who were the village government apparatus in North Maluku, were selected as the samples. The data were analyzed using quantitative and descriptive method, and then tested using Structural Equation Model (SEM)-Partial Least Square (PLS). The result of the research found that perceived behavior control, mimetic pressure, normative pressure and self-awareness consistently influenced the desire to prevent fraud to the village fund; while attitude towards behavior, and coercive pressure did not consistently influence the desire to prevent fraud to the village fund.

Keywords: Fraud Prevention, Fraud, Institutional Theory, Planned Behavior Theory, Self-Awareness, Village Fund.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan yang mengatur tentang desa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014, sehingga Undang-Undang ini dikenal sebagai Undang-Undang Desa. Setelah adanya pengesahan atas undang-undang tersebut, desa mendapatkan anggaran yang cukup besar agar dapat mengelola potensi yang dimiliki dan dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran ekonomi serta pembangunan desa (Humas DJPK, 2018).

Menurut data dari Kementerian Keuangan yang di publikasikan melalui website resminya menunjukan bahwa pada tahun 2015 dana desa dianggarkan sebesar Rp2,7 Triliun dengan rata-rata alokasi setiap desa sebesar Rp280 Juta, tahun 2016 dana desa mengalami peningkatan menjadi Rp46,98 Triliun dengan rata-rata alokasi setiap desa sebesar Rp628 juta, tahun 2017 dan 2018 dana desa juga kembali meningkat menjadi Rp60 Triliun dengan rata-rata alokasi pada setiap desa yaitu sebesar Rp800 juta (Humas DJPK, 2018)

Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah yang cukup besar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan dana yang dilakukan dengan sengaja oleh para aparatur desa. Praktik penyalahgunaan dana yang dilakukan secara sengaja ini merupakan tindakan kecurangan atau dalam istilah akuntansi dikenal dengan

fraud yang sering sekali terjadi dalam pengelolaan dana di sektor pemerintahan desa (Kartikaningrum, 2018)

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terhadap penyalahgunaan dana ditingkat desa menunjukan bahwa jumlah kasus tindakan kecurangan atas penyalahgunaan dana yang terjadi di Indonesia selalu mengalami lonjakan setiap tahunnya dengan jumlah kerugian yang besar pula. Pada tahun 2015 terdapat 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp9,12 Miliar, tahun 2016 sebanyak 41 kasus dengan kerugian sebesar Rp8,33 Miliar, 2017 terdapat sebanyak 96 kasus dengan kerugian sebesar Rp47,56 miliar dan pada tahun 2018 sebanyak 96 kasus dengan kerugian sebesar Rp37,2 Miliar (Sunaryanto dkk., 2018).

Dengan adanya hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) atas kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penanganan maupun pencegahan kasus terkait dengan penyalahgunaan dana (Alamsyah dkk., 2018).

Kasus yang terjadi setiap tahun dengan jumlah yang cukup besar seperti yang telah dipaparkan diatas merupakan cerminan adanya permasalahan pada diri aparatur pemerintah desa dalam mengalola penggunaan dana desa. Masih lemahnya kesadaran pada dalam diri aparatur pemerintah desa dalam bertindak untuk memaksimalkan serta mengefektifkan dana desa sering kali dikaitkan dengan permasalahan pada proses penncegahan kecurangan (*fraud*) dalam penggunaan dana desa.

Menurut data yang didapat dari website resmi kementerian desa (kemendes.go.id) terdapat 62 daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai desa tertinggal dan Maluku Utara ialah salah satu privinsi yang termasuk dalam golongan desa tertinggal, meskipun digolongkan sebagai desa tertinggal Maluku Utara dapat dikatakan sebagai provinsi yang berhasil dalam penggunaan anggaran dana desa. Dalam penelitiannya Rusli Zulfian, (2017) menyatakan bahwa penggunaan dana desa di Maluku Utara telah efektif dan efisien dan dana desa telah digunakan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain realisasi penggunaan dana desa sudah mencapai 100%. Penelitian tersebut juga didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pada tahun 2018 hingga tahun 2019 Maluku Utara termasuk daerah dengan tingkat penyalahgunaan yang rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua dan lain sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.137 Tahun 2017 Maluku Utara memiliki 1.063 desa yang tersebar di 115 kecamatan. Dengan memiliki desa yang cukup banyak dengan tingkat kasus kecurangan (*fraud*) yang rendah maka Maluku Utara termasuk daerah yang mampu untuk mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) yang kemungkinan didukung oleh lingkungan organisasi pemerintahan yang sehat dan berkualitas seperti memiliki sistem pengendalian yang baik dan juga aparatur desa yang jujur serta bertanggungjawab.

Penelitian yang mengkaji tentang pencegahan kecurangan (*fraud*) pada penggunaan dana desa masih jarang dilakukan terutama yang membahas mengenai fenomena pencegahan kecurangan (*fraud*) yang dilihat dari prespektif

perilaku seorang individu atau aparatur pemerintah desa serta bagaimana perilaku individu atau aparatur pemerintah desa tersebut dalam membentuk pemerintahan yang lebih bisa untuk mengefektifkan penggunaan dana desa serta membentuk sistem pemerintahan desa yang lebih baik, maju serta mandiri agar dapat mencapai tujuan dari suatu pemerintahan tersebut agar terhindar dari tindakan kecurangan (*fraud*).

Beberapa motivasi yang melandasi penelitian ini adalah *pertama*, permasalahan pencegahan kecurangan (*fraud*) pada penggunaan dana desa dan melihat aspek keperilakuan atau sisi psikologis pada pemerintahan desa dengan menilai perilaku dari masing-masing individu dalam upaya mencegah kecurangan (*fraud*) pada penggunaan dana desa. Beberapa penelitian terdahulu telah menggunakan pendekatan Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behavior*) untuk menilai perilaku seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) seperti dalam penelitian Basuki Hadiprajitno dan Amal, (2019); Johnson., dkk (2017); Puspasari dan Suwardi, (2016); Respati, (2011).

Dalam penelitiannya, Basuki Hadiprajitno & Amal, (2019) menunjukan bahwa yang menjadi dasar dari Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behavior*) yakni sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku presepsian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap niatan seseorang dalam berperilaku atau dalam melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) seperti korupsi. Dari hasil tersebut diatas maka penulis akan mencoba melakukan pengembangan terhadap Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behavior*)

penelitian yang berkaitan dengan perilaku seseorang dalam melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*).

Menurut *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) bahwa dalam menentukan perilaku yang akan dilakukan, seseorang harus mempunyai keyakinan terhadap sikap atau perilaku yang akan dilakukan, pandangan terhadap perilaku tersebut serta presepsi tentang bagaimana perilaku tersebut dapat diwujudkan. Akan tetapi *Theory of Planned Behavior* hanya menjelaskan sedikit dari sekian banyak hal yang dapat menentukan seseorang dalam berperilaku, apabila dihadapkan dengan situasi tertentu seperti situasi ketidakpastian, situasi yang bertentangan dengan kondisi emosional atau situasi seperti sedang berada dibawah tekanan maka ketiga hal yang merupakan dasar dari *Theory of Planned Behavior* tidaklah cukup untuk menentukan seseorang dalam berperilaku.

Kedua, melihat bagaimana aparatur pemerintahan desa dalam mengefektifkan penggunaan dana desa serta meningkatkan dan atau memperbaiki sistem pemerintahan yang telah ada agar menjadi lebih efektif dari sebelumnya untuk mencegah kecurangan (*fraud*) pada penggunaan dana desa.

Untuk mendukung pencapaian otonomi daerah yang ideal seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan mengurangi kesempatan dan juga peluang dalam penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa maka perlu memperbaiki atau melakukan perbaikan terhadap sistem pemerintahan yang telah ada dengan cara meniru lingkungan, keberhasilan,

norma-norma dan nilai-nilai dari instansi pemerintahan lainnya. Dalam *Institituonal Theory* upaya untuk meniru atau mengadopsi organisasi lain dikenal dengan *isomorfisme*. Menurut DiMaggio dan Powell, (1983) terdapat tiga cara yang bisa dilakukan oleh organisasi agar mirip (*isomorfisme*) dengan organisasi lainnya, yakni *coercive*, yaitu penyesuaian karena adanya tekanan formal yang diberikan kepada organisasi seperti adanya regulasi pemerintah; *mimetic*, yaitu meniru keberhasilan keberhasilan organisasi lain; dan *normative*, yaitu faktor pendorong seperti tingkat kemahiran atau *profesionalisme*.

Ketiga, mengaitkan antara perilaku seseorang dalam berperilaku dan suatu instansi pemerintahan desa dapat mencegah kecurangan (*fraud*) dengan mengenali kesadaran pada dirinya dan atau seberapa besar ia sadar serta yakin dengan apa yang ia lakukan dalam proses merealisasikan penggunaan dana desa. Dalam bukunya Goleman, (2010) menjelaskan bahwa kesadaran diri merupakan proses dalam memahami serta mengawasi perasaan yang sedang dirasakan dari waktu ke waktu. Dengan pemahaman yang dirasakan dalam dirinya ia akan lebih yakin lagi dalam berperilaku.

Pemaparan terkait pada fenomena serta tiga motivasi yang telah dijelaskan diatas menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang pencegahan kecurangan (*fraud*) dilingkungan sektor pemerintahan desa di Maluku Utara melalui pendekatan Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behavior*) dan Teori Institusional (*Institutional Theory*) dengan cara melakukan pengembangan terhadap prinsip yang menjadi dasar dari kedua teori tersebut. Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behavior*) akan dikembangkan untuk

menilai perilaku dan karakteristik masing-masing aparatur pemerintah desa di instansi pemerintahan desa dalam upaya melakukan pencegahan *fraud* dan Teori Institusional (*Institutional Theory*) untuk menilai apakah dengan tekanan yang dirasakan atau didapatkan oleh aparatur pemerintah desa dapat mempengaruhi suatu instansi pemerintahan dalam mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) pada penggunaan dana desa. Serta menambahkan unsur kesadaran diri (*self awareness*) seorang individu atau aparatur pemerintah desa dalam mencegah kecurangan (*fraud*) pada penggunaan dana desa. Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tetarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

"Keinginan Mencegah *Fraud* Pada Penggunaan Dana Desa"

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap keinginan untuk mencegah *fraud*?
2. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap keinginan untuk mencegah *fraud*?
3. Apakah tekanan koersif berpengaruh terhadap keinginan untuk mencegah *fraud*?
4. Apakah tekanan mimetik berpengaruh terhadap keinginan untuk mencegah *fraud*?
5. Apakah tekanan normatif berpengaruh terhadap keinginan untuk mencegah *fraud?*
6. Apakah kesadaran diri berpengaruh terhadap keinginan untuk mencegah *fraud*?

Tujuaan Penelitian

Berdasarkan rumusah permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh sikap terhadap keinginan untuk mencegah *fraud*
2. Mengetahui pengaruh kontrol perilaku terhadap keinginan untuk mencegah *fraud*
3. Mengetahui pengaruh tekanan koersif terhadap keinginan untuk mencegah *fraud*
4. Mengetahui pengaruh tekanan mimetik terhadap keinginan untuk mencegah *fraud*
5. Mengetahui pengaruh tekanan normatif terhadap keinginan untuk mencegah *fraud*.
6. Mengetahui pengaruh kesadaran diri terhadap keinginan untuk mencegah *fraud*.

Manfaat penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Melalui hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan, keilmuan, literatur dan dapat menjadi referensi terkait dengan tindakan dalam mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) pada penggunaan dana desa dari prespektif Teori Perilaku Terencana (*Theory Plann Behavior)* dan Teori Institusional (*Institutional Theory*).

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

      Hasil dari penelitian ini merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama proses perkuliahan ke dalam praktik nyata dan juga menambah wawasan serta pengalaman bagi penulis.

   b. Bagi Pemerintah

      Melalui hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan literatur yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan dan mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) pada penggunaan dan atau pengelolaan dana desa khususnya pada sektor pemerintahan desa di Maluku Utara.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Melalui hasil dari penelitian ini diharapan dapat menjadi masukan, referensi dan atau acuan literatur bagi penelitian selanjutnya dalam memecahkan permasalahan terkait dengan tindakan untuk mencegah kecurangan (*fraud*) pada penggunaan dana desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kecurangan (*Fraud*)

Tuanakotta, (2012) mendefenisikan *fraud* sebagai berikut:

> *"Fraud* merupakan kecurangan yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dan dilakukan dengan sengaja"

Defenisi *Fraud* menurut Arens dkk., (2012) ialah:

> "*Fraud* merupakan penipuan salah saji laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja"

Defenisi *fraud* berdasarkan Webster's New Worls Doactionary dalam Sudarmo, Sawardi, dan Yulianto, (2008), yaitu :

> *"Fraud* merupakan kecerdikan, akal bulus dan tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyajikan data yang salah kepada orang lain. Tidak ada aturan baku dan pasti yang dapat digunakan sebagai ungkapan yang tepat untuk memberikan makna tentang *fraud*. Kecuali cara melakukannya dengan cara yang tidak wajar sehingga merugikan orang lain"

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa, secara umum *fraud* memiliki 3 unsur penting yaitu (1) dilakukan dengan sengaja, (2) tindakan kecurangan dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan (3) merugikan orang lain.

Assosiation of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2016 mengelompokkan *fraud* menjadi 3 kelompok yakni:

1. Korupsi (*Corruption*)

   Merupakan tindakan penyalahgunaan kepercayaan dan atau melanggar tugas untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau sekelompok orang seperti memberi paksa, menawarkan dan menerima suap, mengambil keuntungan dari pihak ketiga dsb
2. Fraud Pada Aset (*Asset Misappropriation*)

   Merupakan tindakan penyalahgunakan aset yang dimiliki perusahaan atau institusi seperti membuat faktur palsu, membuat penggajian palsu, dsb.
3. Fraud pada Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*)

   Merupakan tindakan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja seperti membuat laporan keuangan fiktif, menyembunyikan biaya atau hutang dan membuatnya tampak lebih menguntungkan dsb.

2.1.2. Pencegahan Kecurangan (*Fraud Preventing*)

Pencegahan kecurangan (*preventing fraud*) merupakan bagian dari sistem pengendalian yang memuat langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi potensi risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) (Mohamad Hardi, 2016).

Menurut Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2008 dalam Wulandari dan Nuryanto, (2018) pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan faktor terjadinya penyebab *fraud* (*fraud triangle*), yaitu dengan memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan, dorongan untuk meningkatkan kinerja yang dapat menekan pegawai agar tidak melakukan kecurangan dan rasionalisasi atas kecurangan yang telah dilakukan. Tujuan dilakukannya pancegahan terjadinya kecurangan yaitu untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan pada semua tingkatan dalam organisasi, mencegah dan mempersulit gerak langkah para pelaku kecurangan, mengidentifikasi berbagai kegiatan yang memiliki risiko tinggi untuk melakukan kecurangan serta menjatuhkan tuntutan maupun sanksi pada pelaku yang melakukan kecurangan.

Pencegahan kecurangan (*preventing fraud*) dapat dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut (Amrizal, 2004):

1) Membangun Struktur Pengendalian yang Baik

   Pada tahun 1992 COSO (*The Commite of Sponsoring Organizations of The Treadway Commision*) memperkenalkan suatu rerangka pengendalian dengan dimensi yang lebih luas dari model pengendalian akuntansi tradisional dan juga mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian internal yang terdiri dari 5 komponen yang saling terkait yaitu :

   a) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
   b) Penaksiran Risiko (*Risk Assesment*)
   c) Standar Pengendalian (*Control Activities*)

d) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

e) Pemantauan (*Monitoring*)

2) Mengefektifkan Aktivitas Pengendalian

a) Review Kinerja

b) Pengolahan Informasi

c) Pengendalian Fisik

d) Pemisahan Tugas

3) Meningkatkan Budaya Organisasi

Meningkatkan budaya organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti :

a) Keadilan (*Fairness*)

b) Transparansi (*Transparancy*)

c) Akuntabilitas (*Accountability*)

d) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

e) Moralitas

f) Keandalan (Reliability)

g) Komitmen

4) Mengefektifkan Fungsi Internal Audit

Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar internal audit dapat membantu manajemen dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan hasil analisa, penilaian, saran, tanggapan dan juga komentar terhadap kegiatan yang telah diperiksa, seperti :

a) Internal audit departemen mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi.
b) Internal audit departemen memmpunyai uraian tugas secara tertulis, sehingga dapat mengetahui dengan jelas mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
c) Memiliki internal audit manual
d) Mendapat dukungan yang kuat dari top manajemen.
e) Memiliki sumber daya yang professional, capable, dapat bersikap objective dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.
f) Dapat bekerja sama dengan akuntan publik.
g) Menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas
h) Mengadakan rotasi serta kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti.
i) Memberikan sanksi yang tegas dan sesuai kepada pelaku kecurangan.
j) Membuat program bantuan kepada pegawai yang sedang kesulitan dalam hal keuangan mupun non keuangan.
k) Menetapkan kebijakan terhadap pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana pemberian yang berupa hadiah, mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi.
l) Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam upaya mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit untuk ditemukan.

m) Menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan telah terjadi kecurangan agar dapat diproses sesuai dengan jalur yang benar.

2.1.3. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*-TPB) disusun untuk memprediksi perilaku seseorang dengan lebih spesifik sesuai dengan situasi atau kondisi tertentu. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa manusia akan berperilaku sesuai dengan cara yang masuk akal, sadar dengan apa yang akan ia lakukan dan mempertimbankan segala konsekuensi yang akan didapat. Teori ini juga merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), dan menyatakan bahwa niat merupakan faktor utama yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *Attitude Towards Behaviour* (Sikap), *Subjektif Norma* (Norma Subyektif) dan *Perceived Behavioural Control* (Kontrol Perilaku Persepsian), (Ajzen, 1991).

Perbedaan yang mendasar pada *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavior* yaitu pada *Theory of Reasoned Action* dijelaskan bahwa niat seseorang dalam berperilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *Attitude Towward Behaviour* (Sikap) dan *Subjectif Norm* (Norma Subjektif) dan kemudian pada *Theory of Planned Behavior* ditambahkan satu faktor yaitu *Perceived Behavioural Control* (Kontrol Perilaku-PCB). Faktor *Perceived Behavioural Control* berada diantara niat dan perilaku yang menjadi faktor penentu keberhasilan seseorang dalam berperilaku dikarenakan *Perceived Behavioural Control* dapat memberikan pengaruh langsung terhadap perilaku seseorang (Gross, 2017 dalam Kartikaningrum, 2018)

Gambar 2. 1

Teori Perilaku Terencana (*Theory Plann Behavior*)

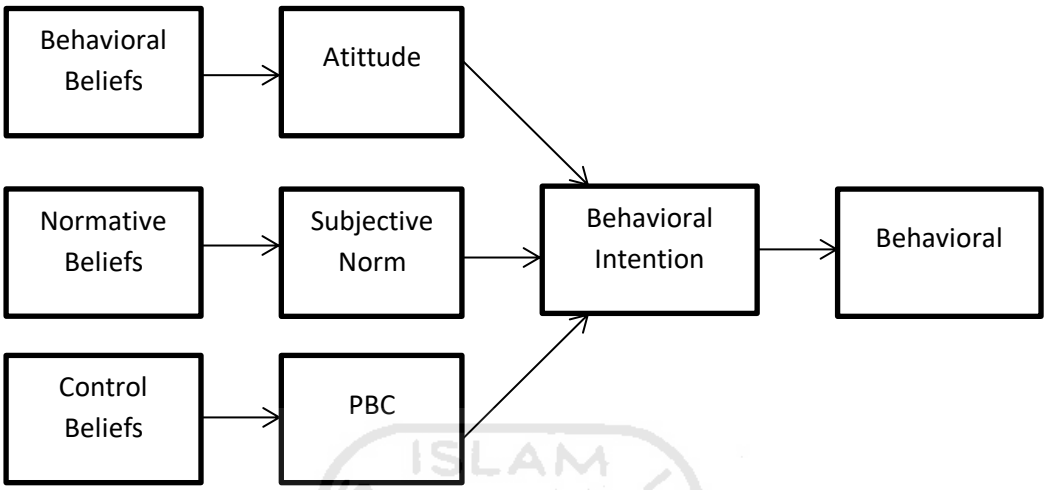

Sari, (2017) dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Keperilakuan" juga menjelaskan kembali tiga faktor yang menjadi niat seseorang dalam berperilaku seperti berikut :

1. Sikap (*Atittude toward behavior*)

   Sikap atau perilaku seseorang ditentukan berdasarkan *behavioral beliefs* atau keyakinan atas konsekuensi yang akan diterima. Keyakinan tersebut dapat memperkuat sikap seseorang terhadap perilaku berdasarkan evaluasi penilaian bahwa perilaku tersebut dapat memberikan manfaat atau sebaliknya memberikan kerugian.

2. Norma Subjektif *(Subjective Norms)*

   Norma subjektif merupakan perasaan seseorang terhadap perilaku yang telah atau akan ia lakukan merupakan harapan dari orang-orang disekitarnya dan

perilaku ini berkaitan dengan perasaan dan bersifat subjektif maka disebut dengan norma subjektif. Sama halnya dengan sikap, norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan, bedanya apabila sikap merupakan keyakinan individu terhadap perilaku yang akan ia lakukan sementara untuk norma subyektif merupakan keyakinan individu atas pandangan orang-orang terhadap perilaku yang akan dilakukan (normative beliefs).

3. Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control*)

   Kontrol Perilaku Persepsian adalah presepsi seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan dalam mewujudkan suatu perilaku. Kontrol Perilaku Persepsian dapat berubah tergantung situasi atau jenis perilaku yang akan dilakukan. Presepsi ini ditentukan oleh keyakinan terhadap tersedianya sumber daya dan kesempatan yang dimiliki (control beliefs) yang dapat mendukung atau sebaliknya menghambat perilaku.

2.1.4. Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Ide pokok dari Teori Institusional (*Institutional Theory*) atau teori kelembagaan adalah bahwa suatu organisasi dibentuk oleh lingkungan intitusional disekitarnya (Gudono, 2017), dan suatu organisasi terbentuk karena adanya tekanan-tekanan institusional yang mengakibatkan terjadinya institusionalisasi (Fardian, 2005).

Teori institusional merupakan teori yang berasal dari konsep ilmu sosiologi. Teori ini membahas tentang dinamika organisasi (Brignall dan Modell, 2000) dan teori ini berfokus pada bagaimana lingkungan dari struktur sosial

organisasi seperti aturan, skema dan norma dalam membentuk perilaku sosial (Darono., dkk 2013). Proses pembentukan perilaku dengan memperhatikan struktur sosial organisasi bertujuan untuk mencapai kesuksesan melalui pengakuan (*legitimasi*) atas segala kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi guna untuk meningkatkan efisiensi dari organisasi tersebut (Wahyuni dan Adam, 2013). Organisasi juga cenderung akan menyesuaikan diri dengan lingkungan disekitarnya dengan cara meniru organisasi lain (*isomorphism*).

Isomorphism merupakan prinsip utama dari teori institusional. *Isomorphism* bersifat paksaan, paksaan dalam arti memaksa organisasi untuk menyerupai organisasi lain atau memaksa organisasi agar terlihat sama dengan organisasi lain ketika dihadapi dengan kondisi atau situasi pada suatu lingkungan tertentu. Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan oleh organisasi agar dapat terlihat sama dengan organisasi lain (DiMaggio dan Powell, 1983), yaitu :

a. *Coercive Pressure* (Tekanan Koersif)

   Tekanan Koersif merujuk pada proses dimana organisasi mengadopsi atau meniru karakteristik atau sifat tertentu karena adanya tekanan (paksaan) dari negara dan organisasi lain seperti regulasi pemerintah, perjanjian kontrak atau peraturan yang telah disetujui sebagai bentuk pengawasan dan kontrol terhadap suatu organisasi agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

b. *Mimetic Pressure* (Tekanan Mimetik)

   Tekanan Mimetik merupakan tekanan yang muncul dari situasi yang ambigu dalam pencapaian tujuan organisasi, situasi yang ambigu seperti keadaan yang

tidak pasti atau keadaan yang meragukan organisasi cenderung akan melakukan proses pembelajaran dengan meniru organisasi lain. Dengan begitu proses meniru ini dilakukan untuk meningkatkan prestise dan reputasi organisasi dalam mencapai tujuan utama dari organisasi tersebut.

c. *Normative Pressure* (Tekanan Normatif)

Tekanan normatif merupakan konsekuensi terhadap profesi yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi. Tekanan normatif muncul karena adanya paksaan untuk meningkatkan profesionalisme yang dimiliki agar tidak salah dalam bertindak, seperti mengikuti pelatihan atau sertifikasi (dengan terpaksa) atau paksaan agar seseorang mampu beradaptasi dengan norma-norma dan budaya dilingkungan sekitar organisasi

2.1.5. Kesadaran Diri (*Self Awareness*)

Menurut Goleman, (2010) kesadaran diri (*Self Awareness*) adalah keadaan dimana seorang individu dapat mengenali emosi serta perasaannya sendiri pada saat perasaan itu terjadi. Dan kemudian menggunakan emosi atau perasaannya tersebut untuk mengarahkan dirinya dalam mengambil keputusan.

Menurut Khairunnisa, (2017) terdapat tiga karakteristik yang dapat membentuk Kesadaran diri (*Self Awareness*), yakni :

1. *Emotional Self Awareness*

Merupakan kesadaran individu dalam mengenali emosi serta perasaan yang sedang dirasakan serta apa dampak dari emosi tersebut. Hal ini berkaitan dengan kesadaran terhadap pemahaman atas apa yang di rasakan dan juga

mengetahui penyebab dari apa yang di rasakan tersebut. Selain itu seorang individu akan mampu membaca dan juga memahami emosi yang dirasakan serta merasakan pengaruh bagi lingkungan disekitarnya.

2. *Accurate Self Assesment*

   Merupakan pengetahuan yang realistis pada kelebihan dan kekurangan yang ada pada dalam dirinya. Jika seorang individu tersebut memiliki kesadaran diri atas kelebihan serta kekurangan yang dimiliki maka ia akan mampu mengenali potensi-potensi dalam dirinya dan juga akan dapat mengevaluasi serta memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.

3. *Self Confidence*

   Merupakan keyakinan diri yang dimiliki oleh seorang individu. Dengan memiliki keyakinan yang didasari oleh kesadaran diri (*Self Awareness*) yang baik seseorang akan cenderung dapat lebih memahami tentang dirinya dan memiliki cara-cara untuk menangani kelebihan serta kekurangan yang dimiliki.

Kesadaran diri (*Self Awareness*) juga merupakan dasar untuk memperjelas pemahaman seorang individu terhadap perilaku atau tindakan yang akan ia lakukan, kesadaran diri juga merupakan salah satu hal yang dapat meyakinkan dirinya sendiri dalam mengamati serta membedakan dirinya dengan orang lain (Maharani dan Mustika, 2016)

2.1.6. Fraud Triangle

Donald R. Cressey merupakan pencetus konsep segitiga kecurangan yang kemudian disebut dengan *fraud triangle* sebagai suatu ilustrasi yang memberi

gambaran tentang faktor risiko terjadinya tindakan kecurangan. Cressey dalam M.Tuanakotta, (2010) memaparkan tiga penyebab dan pemicu terjadinya *fraud*, ketiga penyebab tersebut adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*) yang kemudian dikenal segitiga kecurangan (*fraud triangle*).

Gambar 2. 2

Fraud Triangle

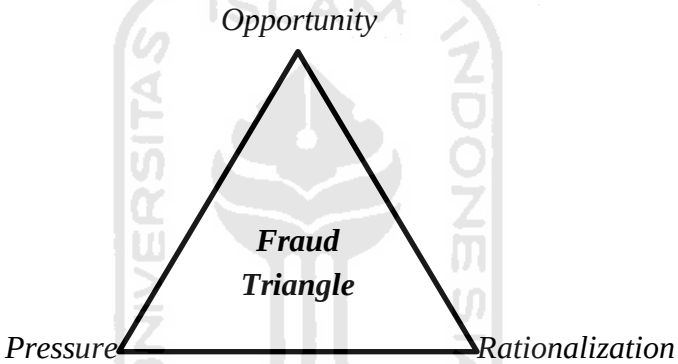

Tekanan (*Pressure*)

Tekanan (*Pressure*) merupakan suatu motivasi seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan karena adanya tekanan (*pressure*) yang menimpa dirinya dalam keadaan yang mendesak. Pada umumnya tekanan (*Pressure*) terjadi karena adanya masalah ekonomi (M.Tuanakotta, 2010).

Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan (*Opportunity*) merupakan suatu keadaan yang dimiliki oleh seseorang dimana ia mendapatkan peluang yang mendorongnya untuk melakukan tindakan kecurangan (M.Tuanakotta, 2010).

Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi (*Rationalization*) merupakan keadaan dimana seseorang akan melakukan serta mencari pembenaran atas segala tindakan yang akan ia lakukan, bahwa tindakan yang ia lakukan tersebut bukan merupakan tindakan yang salah (M.Tuanakotta, 2010).

2.1.7. Perkembangan dan Kondisi Desa

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa diterbitkan untuk menanggulangi diskriminasi terhadap desa pada berbagai bidang pembangunan wilayah pedesaan, seperti pemerataan desa mandiri bagi desa tertinggal dan desa berkembang (Bappenas dan BPS, 2015).

Menurut Irawan, (2019) perkembangan desa menuju kearah desa mandiri didukung oleh penerapan praktik-praktik berdasarkan kebijakan undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa, diantaranya yaitu pertama, mewujudkan kebijakan untuk merubah bentuk pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih baik yang akan dilakukan melalui pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kedua, menyalurkan dana keseluruh desa dan mengefektifkan penggunaan dana yang disalurkan tersebut. Ketiga, memperkuat struktur pengelolaan desa dibawah pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta Kemeterian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Keempat, pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah seperti pelatihan manajemen pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa dan perencanaan partisipatif, mengelola keuangan desa dan penyusunan peraturan desa bagi tiga aparatur pemerintah diseluruh desa wilayah Indonesia.

Setelah melakukan penerapan berdasarkan indikasi praktik-praktik dari kebijakan undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan kondisi desa di Indonesia saat ini dan kedepannya akan menjadi lebih baik dan berkualitas serta organisasi pemerintahan desa, pelayanan publik desa serta musyawarah desa juga menjadi lebih efektif. Masing-masing desa mendapatkan batas dan kawasan desa yang jelas, sarana dan prasarana yang memadai, pemenuhan atas kebutuhan dasar masyarakat sudah mulai terpenuhi, peningkatan pada hasil-hasil usaha, pelayanan pemerintah desa yang memadai serta mendapatkan pengetahuan, sikap maupun keterampilan pada masyarakat desa juga lebih baik dari sebelumnya.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengukur atau menilai perkembangan desa ialah dengan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga kategori yakni,

ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan. Berdasarkan IDM mengelompokkan desa menjadi 5 status yang dikutip dari website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kecamatan Kulonprogo (Adminpemberdayaan, 2019), yakni :

1. Desa sangat tertinggal, merupakan desa yang rentan mengalami bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak mampu untuk untuk mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi.
2. Desa tertinggal, yang merupakan desa dengan potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi masih belum dapat mengelolanya sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Desa berkembang, merupakan desa yang berpotensi menjadi desa maju, memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum dapat mengoptimalkan pengelolaannya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan menganggulangi kemiskinan.
4. Desa maju, yaitu desa yang telah memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta dapat mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan dapat menangulangi kemiskinan.
5. Desa mandiri, yang merupakan desa maju yang mampu melaksanakan pembangunan desa untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

2.1.8. Alokasi Dana Desa

Undang-Undang mengenai kebijakan pemerintah untuk mewujudkan otonomi desa diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan kemudian

dikenal sebagai Undang-Undang Desa. Undang-undang tesebut berisi tentang seperangkat aturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan desa agar lebih maju, adil, makmur dan sejahtera.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat 1 poin d, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dengan jumlah paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Menurut Kartika, (2012) ADD adalah hak yang diperoleh tiap-tiap desa dari pemerintah kota/kabupaten yang berasal dari dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Dura, (2018) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat desa dalam proses pembangunan desa sesuai potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.
4. Meningkatkan swadaya gotong royong pada masyarakat desa.

2.2. Literature Review

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 poin d, Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota. Menurut informasi yang dimuat dalam website resmi

Kementrian Keuangan, penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup serta untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat desa (Humas DJPK). Akan tetapi dana desa

Kecurangan (*Fraud*) menurut *Black Low Dictionary* dalam Rahimah, dkk., (2018) merupakan suatu tindakan yang disengaja terhadap suatu kebenaran dan atau keadaan yang dimanipulasi dari fakta material yang kemudian tindakan tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan yang merugikan dirinya, biasanya tindakan tersebut merupakan kesalahan umum tetapi apabila dilakukan dengan sengaja maka tindakan tersebut dapat dikatakan memiliki potensi kejahatan.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) didefinisikan oleh BPKP (2008a) dalam Wulandari dan Nuryanto, (2018) sebagai upaya yang dilakukan sebagai bentuk pembauran yang dapat menekan terjadinya faktor-faktor penyebab kecurangan (*fraud*) seperti peluang, dorongan dan rasionalisasi. Tujuan dilakukannya pencegahan kecurangan (*fraud*) antara lain yaitu untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) pada seluruh lini organisasi dengan cara seperti melawan pelaku potensial, mempersulit gerak serta langkah pelaku, dan mengidentifikasi kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan (*fraud*).

Beberapa penelitian terdahulu juga membahas mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan di Indonesia maupun Internasional, di

Indonesia sendiri yang telah melakukan penelitian terkait pencegahan kecurangan (*fraud*) diantaranya Atmadja, Adi, & Saputra, (2017), Beawiharta dan Rahayu, (2014), Gaurina dkk., (2017) Hidayati dan Widiastuti, (2019), Huslina dkk, (2015), Jannah, (2016), Noviani dan Sambharakresna, (2014), Pradana (2018), Wardana dkk (2017), Wulandari dan Nuryanto, (2018) dan penelitian internasional diantaranya telah dilakukan oleh Adetiloye, dkk., (2016), Dennis dan Ogoun, (2018), Halbouni dkk., (2016), Onza dan Lamboglia, (2011), Jamaliah Said dkk., (2017) Saleh, (2016), Setiawan, (2018), Yuniarti, (2017) Dari penelitian yang telah dilakukan oleh yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*) antara lain pengendalian internal, moral, kesadaran anti *fraud*, perilaku etis, *good corporate governance*, dan kompetensi.

Penelitian terdahulu mengenai pengendalian internal memberikan hasil yang tidak konsisten terhadap pencegahan *fraud*. Menurut Wardana dkk., (2017) pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), apabila pengendalian internal telah diterapkan secara efektif seperti aktivitas pengawasan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan maka kecurangan (*fraud*) akan mudah untuk dicegah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dkk., (2019) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Berbeda dengan kedua penelitian yang dijelaskan dalam paragraf ini, penelitian yang dilakukan oleh Saleh, (2016) memberikan hasil bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan

kecurangan (*fraud*), karena manajemen menggunakan pengendalian internal sebagai alat untuk meningkatkan dan mengembangkan alokasi sumber daya yang efisien dan bukan untuk mengurangi dan atau mencegah kecurangan (*fraud*). Sementara menurut hasil penelitian yang dilakukan Peltier-Rivest & Lanoue, (2015) dan Adetiloye dkk., (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal efektif dapat mencegah serta mengurangi *fraud*.

Moralitas juga tidak konsisten dalam mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*). Menurut Rahimah dkk., (2018), moralitas memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), semakin tinggi level penalaran moral yang dimiliki oleh seseorang maka akan mendukung seseorang dalam melakukan hal yang benar, sebaliknya semakin rendah penalaran moral yang dimiliki maka akan semakin besar kemungkinan melakukan hal atau tindakan yang tidak benar seperti kecurangan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Setiawan, (2018) yang menunjukan bahwa individu dengan memiliki tingkat moral yang rendah maka cenderung dalam melakukan penipuan kecurangan dan menurut Wardana dkk., (2017) jika moralitas yang dimiliki aparat semakin tinggi maka pencegahan *fraud* juga akan tinggi. Akan tetapi hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradana, dkk., (2018) dimana hasilnya menunjukan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* hal tersebut dikarenakan moralitas tidak menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*, moralitas berkaitan dengan penalaran individu yang bersifat privasi sedangkan untuk pencegahan *fraud* bersifat umum.

Terdapat ketidak konsistenan pada kesadaran anti *fraud* dalam mempengaruhi pencegahan kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti, (2017) menunjukan bahwa kesadaran anti *fraud* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dan menurutnya kesadaran anti *fraud* merupakan upaya yang dapat meningkatkan kesadaran masing-masing individu terhadap pentingnya mencegah kecurangan dalam suatu organisasi. Sementara menurut Wulandari dan Nuryanto, (2018) kesadaran anti *fraud* kerap dinilai penting dalam mencegah serta meminimalisir terjadinya kecurangan akan tetapi kebijakan anti *fraud* yang diterapkan pada umumnya bersifat lebih partisipatif dan tidak memberikan tekanan pada pelaksanaan serta pengawasan dan juga segala implementasinya

Perilaku etis memberikan hasil yang konsisten terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Menurut Noviani dan Sambharakresna, (2014) perilaku etis yang dimiliki oleh seseorang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*, apabila seseorang memiliki perilaku etis maka akan dapat memudahkannya dalam meningkatkan hasil dan tingkat keberhasilan yang dimana hal tersebut dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal tersebut sejalan dengan dengan Gaurina, dkk., (2017), menurutnya apabila dilihat dari presepsi karyawan dari hasl penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa perilaku etis memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dalam penelitian Jamaliah Said dkk., (2017) juga menyebutkan bahwa nilai-nlai etika yang sering dikaitkan dengan perilaku etis tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya penipuan atau kecurangan (*fraud*),

menurutnya karyawan akan cenderung lebih mematuhi perilaku yang etis selama bekerja dan mengikuti standar etika yang telah ditetapkan dengan demikian organisasi harus lebih meningkatkan atau memperketat standar yang mengatur etika karyawan agar kecurangan (*fraud*) dapat dengan mudah dicegah.

Selain perilaku etis, variabel *good corporate governance* juga memberikan hasil yang konsisten terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Penelitian terdahulu yang pernah meneliti hubungan antara *good corporate governance* dengan pencegahan *fraud* diantaranya pernah dilakukan oleh Beawiharta dan Rahayu, (2014), Dennis dan Ogoun, (2018), Halbouni dkk, (2016), Hidayati dan Widiastuti (2019), Salleh dan Othman, (2016) Jannah, (2016) serta Onza dan Lamboglia, (2011). Menurut Hidayati dan Widiastuti, (2019) apabila *good corporate governance* telah diterapkan dengan baik maka dapat meningkatkan pencegahan kecurangan (*fraud*), untuk meningkatkan tindakan pencegahan *fraud*, suatu organisasi dapat melakukan pembagian tugas berdasarkan latar belakang yang dimiliki dan juga harus memastikan tidak terdapat tumpang tindih dalam pembagian tugas, selain itu suatu organisasi juga dapat melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugas yang telah dibeikan dengan baik dan tepat guna meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Beawiharta dan Rahayu, (2014) juga berpendapat bahwa dengan menerapkan *good corporate govenrnance* dengan baik maka akan memberikan hasil yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan. Selain itu menurut Dennis dan Ogoun, (2018) suatu lembaga organisasi harus ditinjau dan dipantau terus menerus agar dapat mengendalikan,

mencegah kecurangan seperti manipulasi dan penyimpangan lainnya berdasarkan beberapa indikator tertentu seperti transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas.

Kompetensi juga memberikan hasil yang konsisten terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Menurut Atmadja dkk., (2017), terdapat pengaruh antara kompetensi dengan pencegahan *fraud* dimana kompetensi (kemampuan atau keahlian) yang dimiliki memiliki peran penting untuk mencapai tujuan organisasi seperti kesejahteraan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut diatas, menurut Huslina, dkk., (2015) anggota organisasi akan diawasi dan bersentuhan langsung dengan badan pengawas maka anggota organisasi harus memiliki kompetensi karena akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan.

Sebagian besar kelemahan penelitian terdahulu adalah kurangnya variabel independen yang digunakan dalam penelitian untuk menguji pencegahan kecurangan (*fraud*). Sehingga banyak dari penelitian terdahulu yang memberikan saran untuk menambah variabel. Misalnya Atmadja dkk., (2017) yang menyarankan untuk melakukan pengembangan serta mempertimbangan variabel lain dari segi keperilakuan, pedoman atau standar yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*) dan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Widiastuti, (2019) yang menyarankan untuk perlunya melakukan pengembangan terhadap variabel penelitian seperti asimetri informasi, eksternal auditor dan kompensasi agar dapat menjelaskan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) yang lebih signifikan.

Dalam penelitiannya, Sow dkk., (2017) memberikan saran bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan topik atau tema pencegahan kecurangan (*fraud*) agar melakukan langkah-langkah pencegahan kecurangan (*fraud*) pada industri atau organisasi yang lebih besar secara spesifik seperti organisasi pemerintahan pusat maupun daerah, yayasan, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya.

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1. Pengaruh Sikap (*Attitude Toward Behaviour*) Terhadap Keinginan Mencegah *Fraud*

Sikap (*Attitude Toward Behaviour*) merupakan penilaian seseorang terhadap perilaku positif yang akan dipilih untuk diterapkan pada dirinya dalam berperilaku (Sari, 2017). Sikap (*Attitude Toward Behaviour*) dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah dampak yang diperoleh seorang aparatur pemerintah desa apabila ia melakukan pencegahan *fraud* pada penggunaan dana desa. Sikap (*Attitude Toward Behaviour*) dalam konteks pencegahan kecurangan (*fraud*). Pada penelitian ini dikembangkan dengan melihat moral yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa.

Apabila aparatur dalam organisasi pemerintahan memiliki penalaran moral yang tinggi terhadap sesuatu yang dikerjakan maka ia cenderung akan bekerja dengan jujur dan tidak memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu untuk mewujudkan keinginan pribadinya dan sebaliknya apabila seorang aparatur memiliki penalaran moral yang rendah maka ia akan melakukan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri dan cenderung akan menutupi hal-hal yang memicu sanksi hukum yang

dapat menjerat dirinya (Pradana dkk., 2018). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pradana dkk., (2018) dan Wardana dkk., (2017) mendukung jika moralitas dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H1 : Sikap (*Attitude Toward Behaviour*) Berpengaruh Positif Terhadap Keinginan Untuk *Fraud*

2.3.2. Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control)* Terhadap Keinginan Mencegah *Fraud*

Kontrol Perilaku Presepsian (*Perceived Behavioral Control*) merupakan presepsi seseorang terhadap tingkat kesulitan yang akan diterima ketika ia akan melakukan suatu tindakan/perilaku Zulaikha dan Hadiprajitno, (2016). Kontrol perilaku presepsian (*Perceived Behavior Control*) yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah pengendalian seorang individu terhadap perilaku yang ia lakukan dapat mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa

Pengaruh Kontrol Perilaku Presepsian (*Perceived Behavioral Control*) terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dikembangkan dengan melihat cara seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan norma dan nilai yang telah berlaku yang dimana hal tersebut sering dikaitkan dengan dengan perilaku etis. Menurut Gaurina dkk., (2017) salah satu cara yang efektif dalam upaya melakukan pencegahan *fraud* adalah dengan cara menerapkan perilaku etis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Semakin besar penerapan perilaku etis maka semakin besar pula pencegahan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*)

Apabila suatu organisasi pemerintahan desa telah berhasil menerapkan perilaku etis seperti perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dilingkungan sekitar maka dapat meningkatkan keinginan untuk berperilaku baik dan juga akan memotivasi seseorang untuk tidak melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) selain itu dengan menerapkan perilaku etis kesempatan untuk melakukan kecurangan (*fraud*) juga akan semakin kecil. Dengan begitu norma subjektif (*subjective norms*) sangat penting untuk diterapkan dan juga ditingkatkan pada organisasi pemerintahan desa guna untuk mencegah seseorang melakukan *fraud* pada dana desa. Beberapa penelitian terdahulu juga mendukung perilaku etis dapat mencegah *fraud*, yang dilakukan oleh Gaurina dkk., (2017), Noviani dan Sambharakresna, (2014) Jamaliah Said dkk., (2017). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H2 : Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control)* Berpengaruh Positif Terhadap Keinginan Untuk Mencegah *Fraud*

2.3.3. Pengaruh Tekanan Coercive (*Coercive Pressure*) terhadap Keinginan Untuk Mencegah *Fraud*

Tekanan Koersif (*Coercive Pressure*) merupakan tekanan sosial untuk mengikuti norma yang berlaku atau yang telah ada, tekanan sosial tersebut bersifat formal maupun informal seperti undang-undang, peraturan yang berlaku dimasyarakat sekitar organisasi dan peraturan lainnya (Reichborn-Kjennerud dkk., 2019). Tekanan koersif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengadopsian karakteristik tertentu karena adanya paksaan yang bersifat tekanan

dari negara dalam mencegah *fraud*, tekanan koersif coba dikembangkan dengan variabel *good corporate governance*.

Menurut Hidayati dan Widiastuti, (2019) apabila *good corporate governance* dapat diterapkan dengan baik maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan (*fraud*). Jika dikaitkan dengan objek dalam penelitian ini yakni organisasi pada sektor pemerintahan desa, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diatas berarti telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa Pasal 127 Ayat 2 huruf e dan dengan begitu kecurangan (*fraud*) akan mudah untuk dicegah. Penelitian yang dilakukan oleh Beawiharta dan Rahayu, (2014), Hidayati dan Widiastuti, (2019) dan juga Jannah, (2016) konsisten untuk mendukung apabila *good corporate governance* dapat mencegah *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah :

H3 : Tekanan Koersif (*Coercive Pressure*) Berpengaruh Positif Terhadap Keinginan Untuk Mencegah *Fraud*

2.3.4. Pengaruh Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*) dan terhadap Keinginan Mencegah *Fraud*

Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*) berkaitan dengan meniru organisasi lain untuk mencapai kesuksesan atau meningkatkan kualitas agar terlihat sama seperti organisasi lainnya (Reichborn-Kjennerud dkk., 2019). Untuk meniru kesuksesan organisasi sejenis lainnya dan meningkatkan kualitas organisasi, suatu organisasi dapat melakukan review terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan

apakah telah sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Dengan melakukan review atas kinerja tersebut maka dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan serta apa yang harus ditingkatkan agar menjadi lebih baik dari organisasi sejenis lainnya.

Tekanan mimetik (*mimetic pressure*) yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perilaku atau perbuatan yang dilakukan dengan cara mencontohi pemerintahan sejenis untuk mencegah terjadinya *fraud*, dengan begitu variabel internal dapat menggambarkan seberapa maksimal kinerja suatu instansi pemerintahan desa dan bagaimana caranya untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) pada penggunaan dana desa. Menurut Wardana dkk., (2017) apabila pengendalian internal dapat diterapkan dengan efektif seperti melakukan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan maka dapat mencegah kecurangan (*fraud*). Beberapa penelitian terdahulu juga mendukung apabila pengendalian internal dapat mencegah *fraud*, diantaranya dilakukan oleh Hidayati dan Widiastuti, (2019) dan Wardana dkk., (2017). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah :

H4 : Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*) Berpengaruh Positif Terhadap Keinginan Untuk Mencegah *Fraud*

2.3.5. Pengaruh Tekanan Normatif (*Normaveti Pressure*) terhadap Keinginan Mencegah *Fraud*

Tekanan Normatif (*Normative Pressure*) sering dikaitkan dengan profesionalisasi. Tekanan normative (no*rmative pressure*) merupakan tekanan

yang berasal dari norma yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi atau lembaga seperti potensi, kemahiran dan pengetahuan yang dimiliki guna untuk meningkatkan profesionalitas dalam bekerja, Krell, Matook, dan Rohde, (2016).

Tekanan normatif (*Normative Pressure*) yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah bagaimana seorang aparatur pemerintah desa dapat bekerja dengan profesional agar dapat mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Maka dalam penelitian ini tekanan normatif dikembangkan dengan melihat kompetensi atau tingkat kemahiran yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Menurut Atmadja, dkk., (2017) kompetensi (kemampuan atau kemahiran) seseorang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi seperti kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) maka dengan begitu tekanan normatif dalam penelitian ini akan dikembangkan dengan melihat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh Atmadja dkk., (2017) dan Huslina dkk., (2015) memberikan hasil konsisten yang mendukung apabila kompetensi yang dimiliki dapat mencegah terjadinya *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah :

H5 : Tekanan Normatif (*Normative Pressure*) Berpengaruh Positif Terhadap Keinginan Untuk Mencegah *Fraud*

2.3.6. Pengaruh Kesadaran Diri (*Self Awareness*) terhadap Keinginan Mencegah *Fraud*

Kesadaran diri (*self awareness*) merupakan keadaan dimana seseorang memahami dan atau mengetahui apa yang dirasakan dan kemudian menggunakannya untuk memandu dirinya agar lebih yakin dalam mengambil keputusan dalam bertindak (Goleman, 1999). Kesadaran diri (*self awareness*) dalam penelitian ini ialah pemahaman serta kesadaran aparatur pemerintah desa tentang pentingnya mencegah kecurangan (*fraud*) pada penggunaan dana desa.

Apabila kesadaran diri (*self awareness*) dihubungkan dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dikembangkan dengan melihat kesadaran anti *fraud* pada masing-masing individu atau aparatur pemerintahan desa, karena menurut Yuniarti, (2017) dengan adanya kesadaran anti *fraud* diharapkan dapat meningkatkan kepedulian bagi semua pihak dalam organisasi terhadap ancaman kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan diri sendiri maupun organisasi. Maka dengan memiliki tingkat kesadaran anti *fraud* yang tinggi akan meminimalisir serta mengurangi risiko terjadinya *fraud* terutama dalam penggunaan dana desa. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti, (2017) mendukung apabila kesadaran diri dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

H6 : Kesadaran diri (*self awareness*) Berpengaruh Positif Terhadap Keinginan Untuk Mencegah *Fraud*

2.4. Kerangka Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka, penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

Gambar 2. 3

Kerangka Penelitian

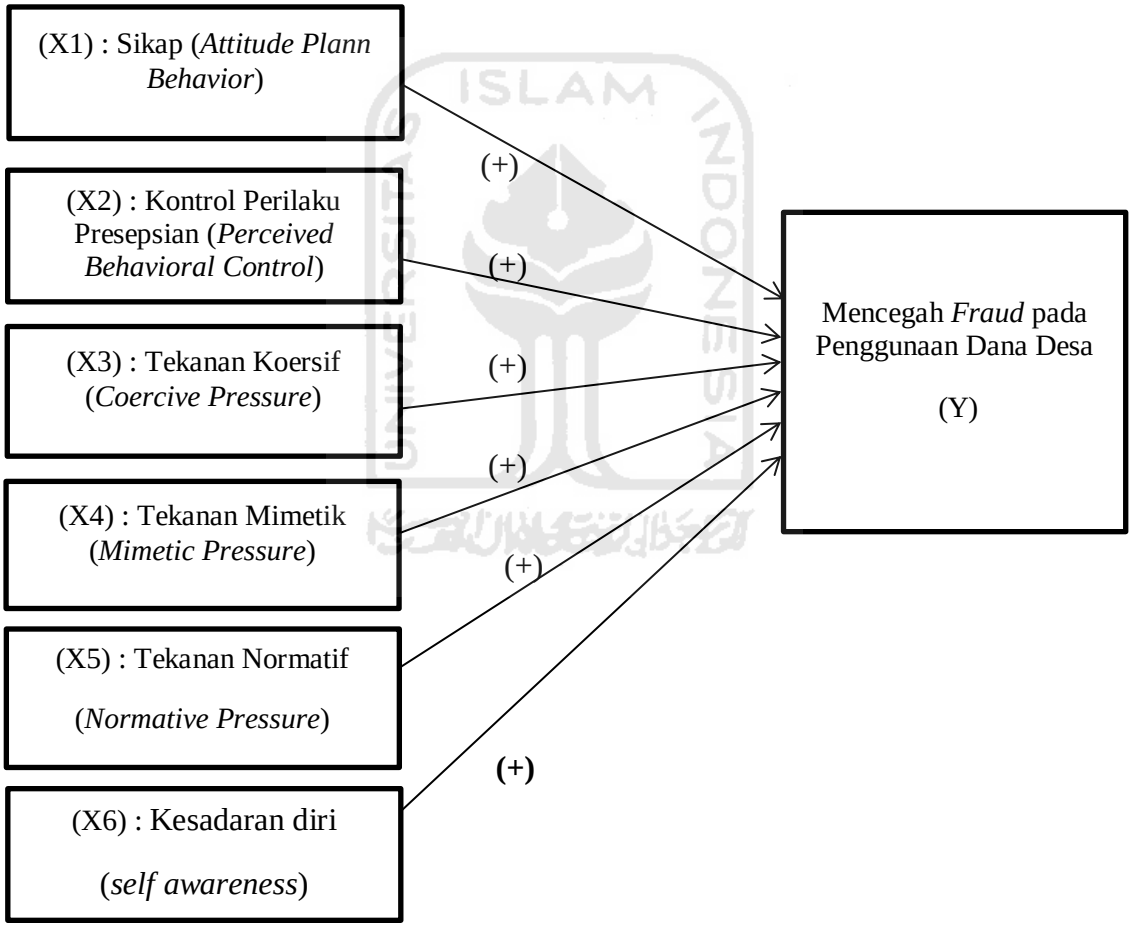

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa di Maluku Utara. Alasan menjadikan aparatur pemerintah desa di Maluku Utara adalah karena Maluku Utara memiliki jumlah desa yang cukup banyak yakni 1.063 desa akan tetapi memiliki tingkat kecurangan (*fraud*) yang rendah. Hal ini yang menjadikan desa-desa di Maluku Utara sebagai objek penelitian dan dapat membuktikan bahwa tingkat kecurangan (*fraud*) yang rendah didukung oleh perilaku pada masing-masing aparatur pemerintah desa dan berbagai macam tekanan seperti tekanan dari regulasi pemerintah, tekanan dari organisasi lain atau tekanan dari norma-norma yang telah berlaku untuk menjadi lebih baik dan terhindar dari tindakan kecurangan (*fraud*).

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang dapat didefinisikan sebagai teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria terntentu sehingga dapat mewakili populasi yang akan diteliti (Sugiono, 2015), Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Responden yang merupakan kepala desa di kantor desa Kabupaten Tidore Kepulauan, Kecamatan Oba, Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba Tengah, Maluku Utara.

2. Responden yang merupakan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yaitu sekertaris desa, kepala seksi dan atau kepala bagian dan bendahara di kantor desa Tidore Kepulauan, Kecamatan Oba, Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba Tengah, Maluku Utara.
3. Responden yang merupakan kepala bagian atau staff yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana desa di kantor desa Tidore Kepulauan, Kecamatan Oba, Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba Tengah, Maluku Utara.
4. Responden dengan masa kerja minimal 3 tahun di kantor desa Tidore Kepulauan, Kecamatan Oba, Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba Tengah, Maluku Utara.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data penelitian yang didapatkan langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara) Indriantoro dan Supomo, (2014). Penggunaan data primer memiliki tujuan agar dapat memperoleh data secara langsung dari aparatur pemerintah desa di Maluku Utara dengan menggunakan bantuan kuesioner.

3.3. Teknik dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner. Penggunaan kuesioner diukur dengan Skala Likert dengan menyediakan 5 pilihan

jawaban yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju (Sugiono, 2015).

3.4. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (*Independent Variabels*) dan variabel terikat (*Dependent Variabels*). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sikap (*Attitude Toward Behaviour*), Kontrol Perilaku Persepsian (Perceived Behavioral Control, Tekanan Koersif (*Coercive Pressure*), Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*), dan Tekanan Normatif (*Normaveti Pressure)*. Pada penelitian ini variabel dependen yang dikunakan adalah pencegahan kecurangan (*Preventing Fraud*).

3.4.1. Variabel Bebas (Independent Variabel)

3.4.1.1. Sikap (*Attitude Toward Behaviour*)

Sikap (*Attitude Toward Behaviour*) adalah Sikap atau perilaku seseorang ditentukan berdasarkan *behavioral beliefs* atau keyakinan atas konsekuensi yang akan diterima. Keyakinan tersebut dapat memperkuat sikap seseorang terhadap perilaku berdasarkan evaluasi penilaian bahwa perilaku tersebut dapat memberikan manfaat atau sebaliknya memberikan kerugian (Sari, 2017). Variabel Sikap (*Attitude Toward Behaviour*) diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju), (Sugiono, 2015).

3.4.1.2. Kontrol Perilaku Presepsian (*Perceived Behavioral Control*)

Kontrol Perilaku Persepsian adalah presepsi seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan dalam mewujudkan suatu perilaku. Kontrol Perilaku Persepsian dapat berubah tergantung situasi atau jenis perilaku yang akan

dilakukan. Presepsi ini ditentukan oleh keyakinan terhadap tersedianya sumber daya dan kesempatan yang dimiliki (*control beliefs*) yang dapat mendukung perilaku atau sebaliknya menghambat perilaku (Sari, 2017). Variabel Kontrol Perilaku Presepsian (*Perceived Behavioral Control*) diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju), (Sugiono, 2015).

3.4.1.3.Tekanan Koersif (Coercive Pressure)

Tekanan Koersif (coercive pressure) merujuk pada proses dimana organisasi mengadopsi atau meniru karakteristik atau sifat tertentu karena adanya tekanan (paksaan) dari negara dan organisasi lain seperti regulasi pemerintah, perjanjian kontrak atau peraturan yang telah disetujui sebagai bentuk pengawasan dan kontrol terhadap suatu organisasi agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Variabel tekanan koersif ini akan diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju) (Sugiono, 2015).

3.4.1.4.Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*)

Tekanan Mimetik merupakan tekanan yang muncul dari situasi yang ambigu dalam pencapaian tujuan organisasi, situasi yang ambigu seperti keadaan yang tidak pasti atau keadaan yang meragukan organisasi cenderung akan melakukan proses pembelajaran dengan meniru organisasi lain. Dengan begitu proses meniru ini dilakukan untuk meningkatkan prestise dan reputasi organisasi dalam mencapai tujuan utama dari organisasi tersebut. Variabel tekanan mimetik

akan diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju), (Sugiono, 2015).

3.4.1.5.Tekanan Normatif (Normative Pressure)

Tekanan normatif merupakan konsekuensi terhadap profesi yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi. Tekanan normatif muncul karena adanya paksaan untuk meningkatkan profesionalisme yang dimiliki agar tidak salah dalam bertindak, seperti mengikuti pelatihan atau sertifikasi (dengan terpaksa) atau paksaan agar seseorang mampu beradaptasi dengan norma-norma dan budaya dilingkungan sekitar organisasi. Variabel normatif akan diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju).

3.4.1.6. Kesadaran diri (*self awareness*)

Kesadaran diri merupakan dasar dari kecerdasan emosional yaitu kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu agar lebih yakin dalam menentukan keputusan dalam bertindak atau melakukan sesuatu (Sastrawinata, 2011). Variabel kesadaran diri akan diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju), (Sugiono, 2015)

3.4.2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Menurut Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2008 dalam (Wulandari dan Nuryanto, 2018) pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan faktor terjadinya penyebab *fraud* (*fraud triangle*), yaitu dengan memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk

melakukan kecurangan, dorongan untuk meningkatkan kinerja yang dapat menekan pegawai agar tidak melakukan kecurangan dan rasionalisasi atas kecurangan yang telah dilakukan. Variabel dependen akan diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju), (Sugiono, 2015).

3.5. Pengukuran Variabel Penelitian

Tabel 3. 1

Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	**Defenisi Operasional**	**Indikator**
X1: Sikap (*Attitude Toward Behavior*)	Sikap dalam menentukan seseorang dalam berperilaku.	1. Budaya organisasi yang baik. 2. Kesadaran akan tanggung jawab yang dimiliki dalam organisasi. 3. Moralitas individu yang menentukan sikap dalam berperilaku. Sumber : Rahimah, dkk., (2018), Suastawan dkk., (2017).
X2: Kontrol Perilaku Presepsian (*Perceived Behavioral Control*)	Mudah tidaknya dalam berperilaku.	1. Presepsi aparatur terhadap perilaku etis. 2. Penerapan perilaku etis 3. Kesempatan dalam melakukan sebuah tindakan. Sumber : Gaurina dkk., (2017)
X3: Tekanan Koersif (*Coercive Pressure*)	Tekanan sosial untuk mengikuti norma-norma, nilai-nilai atau undang-undang yang berlaku.	1. Akuntabilitas. 2. Transparansi. 3. Kesesuaian pengelolaan dana desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014. Sumber : Hidayati dan Widiastuti, (2019)
X4: Tekanan	Tekanan untuk menjadi	1. Konsistensi dalam rencana

Mimetik (*Mimetic Pressure*)	lebih baik atau sama dengan organisasi pemerintahan sejenis lainnya.	dan hasil kerja. 2. Pemantauan dan penekanan aturan. Sumber : Wardana dkk., (2017), Wulandari dan Nuryanto, (2018)
X5: Tekanan Normatif (*Normative Pressure*)	Tekanan berdasarkan profesi yang dimiliki.	1. Latar belakang pendidikan yang dimiliki. 2. Pemahaman akan tugas yang dikerjakan. 3. Pelaksanaan pelatihan yang diadakan atau diikuti dan pengaplikasiannya. Sumber : Atmadja dkk., (2017)
X6: Kesadaran diri (*self awareness*)	Memahami emosi diri dan dapat mengendalikan diri sendiri.	1. Penerapan kesadaran anti *fraud* 2. Evaluasi proses kesadaran anti *fraud* 3. Kontrol akan kesadaran anti *fraud* Sumber : (Yuniarti, 2017)
X: Pencegahan *Fraud*	Mencegah potensi terjadinya tindakan/perilaku kecurangan.	1. Kode etik yang jelas, mudah untuk dimengerti dan ditaati. 2. Sanksi terhadap segala bentuk kecurangan (*fraud*) yang dilakukan. Sumber : Wardana dkk., (2017)

3.6.Teknik Analisa Data

Alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model analisis *Partial Least Squares*(PLS). Menurut (Ghozali dan Latan, 2014) *Partial Least Squares* merupakan metode analisis yang *powerfull* karena meniadakan asumsi-asumsi seperti data yang harus terdistribusi normal secara multivariate, tidak adanya problem multikolonieritas antar variabel endogen dan data skala tertentu atau jumlah skala yang kecil selain itu *Partial Least Squares* juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori. Tujuan dari

Partial Least Squares(PLS) adalah untuk menghasilkan model yang dapat mentransformasikan seperangkat variabel yang saling berkorelasi. Koefisien parameter regresi dapat diperoleh dari korelasi secara langsung antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.6.1. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan model pengukuran (*outer model*). Model pengukuran (*outer model*) dilakukan untuk menunjukan hubungan antar variabel laten dengan item indikator (Ghozali & Latan, 2014). Pada model pengukuran (*outer model*) akan dilakukan pengujian pada validitas dan reliabilitas data.

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner akan dinyatakan valid apabila pertanyaan dalam kuisioner tersebut dapat mengungkapkan konsep yang diukur oleh kuisioner tersebut. Jika nilai validitas yang dihasilkan tinggi maka instrumen atau kuisioner yang digunakan valid.

Penelitian ini menggunakan uji validitas konstruk/variabel dengan mengkorelasikan masing-masing skor dari item pertanyaan dengan skor total yang dihasilkan. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan model *Averange Variance Extracted* (AVE), nilai *variance extracted* dari masing-masing variabel harus lebih besar dari 0,05 dan nilai loading untuk setiap item pertanyaan juga lebih dari 0,5 apabila terdapat nilai yang lebih kecil dari 0,05 maka dianggap tidak valid dan tidak akan dianalisis (Ghozali & Latan, 2014). Untuk variabel serta

item-item atau pertanyaan yang hasilnya valid akan diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pengujian kehandalan (Uji Reliabilitas).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan indikator dari variabel/kontsruk penelitian. Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan kembali apakah kuisioner yang digunakan telah reliabel, handal dan dapat dipercaya atau tidak. Uji realibilias dalam penelitian ini menggunakan nilai dari *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* yang dianggap reliabel apabila memiliki nilai lebih dari 0,70 Apabila seluruh variabel memiliki koefisien *Composite Reliability* yang lebih besar dari 0,70 maka kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini dianggap reliabel karena menunjukkan tingkat konsistensi dan keakuratan yang baik (Ghozali & Latan, 2014).

3.6.2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model struktural (*Inner Model*). Model struktural (*Inner Model*) ini dilakukan untuk menspesifikasi hubungan antar variabel (Ghozali & Latan, 2014). Pada model struktural (*Inner Model*) akan dilakukan pengujian signifikansi untuk menilai pengaruh dari masing-masing variabel dengan ketentuan hipotesis akan diterima apabila nilai *T-Statistic* lebih besar dari nilai *P-Value*, nilai *P-Value* ditentukan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,05 (*T-Statistic* > *P-Value* 1,96). Uji hipotesis dalam penelitian ini juga akan melakukan pengujian pada variabel dengan menggunakan 5 persmaan model pengujian, dimana :

X1 : Sikap (*Attitude Toward Behavior*)

X2 : Kontrol Perilaku Presepsian (*Perceived Behavioral Control*)

X3 : Tekanan Koersif (*Coercive Pressure*)

X4 : Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*)

X5 : Tekanan Normatif (*Normative Pressure*)

X6 : Kesadaran Diri (*Self Awareness*)

Y : Pencegahan *Fraud*

Dan 5 persamaan model yang akan dilakukan pengujian yaitu,

$Y=B1X1 + B2X2 + e1$ **Model 1**

$Y=B3X3 + B4X4 + B5X5 + e2$ **Model 2**

$Y=B1X1 + B2X2 + B6X6 + e3$ **Model 3**

$Y=B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + e4$ **Model 4**

$Y= B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + e5$ **Model 5**

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil penelitian mengenai keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Berdasarkan dengan teori yang digunakan dan telah dijelaskan sebelumnya, penulis kemudian melakukan analisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan pokok permasalahan yang kemudian dikembangkan menjadi rumusan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau sebaliknya ditolak. Analisis yang dilakukan akan dijelaskan dalam bab ini yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Hasil Pengumpulan Data

   Pada bagian ini akan dijelaskan jumlah data yang disebar dan yang telah berhasil terkumpul untuk dilakukan analisis.

2. Deskripsi Responden

   Bagian ini akan menjelaskan tentang responden dalam penelitian ini seperti jenis kelamin, umur dan berapa lama bekerja.

3. Hasil Pengujian Data

   Pengujian data terkait dengan uji realibilitas dan validitas, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi syarat dalam pengujian hipotesis.

4. Hasil Pengujian Hipotesis

   Dalam bagian pengujian hipotesis, akan dijelaskan pembahasan dari hasil penelitian setelah dilakukan analisis.

4.1.Hasil Pengumpulan Data

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisioner. Subjek dalam penelitian ini ialah para aparatur pemerintah desa di kantor desa kecamatan Oba, kecamatan Oba Utara dan kecamatan Oba Tengah, Maluku Utara.

Sebanyak 110 kuisioner yang disebarkan di kantor desa kecamatan Oba, kecamatan Oba Utara dan kecamatan Oba Tengah, Maluku Utara dan kuisioner yang kembali adalah sebanyak 105 kuisioner. Proses pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Juli 2020 hingga 27 Agustus 2020. Berikut ringkasan dari penyebaran dan pengembalian kuisoner.

Tabel 4. 1

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	**Jumlah Kuisioner**	**Presentase**
Kuisioner yang disebar	110	100%
Kuisioner yang kembali	105	95%
Kuisioner yang tidak kembali	5	5%
Kuisiner yang memenuhi syarat	0	0
Kuisioner yang tidak memenuhi syarat	0	0

Sumber : Hasil Penelitian 2020

4.2.Deskripsi Responden

Berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini, pria memiliki jumlah terbanyak dengan presentase hingga 63% dan wanita sebanyak 37%. Hal tersebut diuraikan pada tabel 4.2 seperti berikut:

Tabel 4. 2

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
Pria	130	63%
Wanita	75	37%
Jumlah	205	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020.

Dari total 205 responden tidak terdapat responden yang berada dalam kelompok usia kurang lebih 20 tahun, *range* usia terbanyak dalam penelitian ini ialah pada kelompok usia 30-39 tahun dengan presentase sebanyak 39% (80 responden), kemudian responden dengan kelompok usia 20-29 tahun sebanyak 27% (55 responden), responden dengan kelompok usia 40-49 tahun sebanyak 21% (45 responden), dan 55-55 tahun keatas sebanyak 7% (15 responden).

Tabel 4. 3

Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentasi
± 20 Tahun	0	0
20-29 Tahun	55	27%
30-39 Tahun	80	39%
40-49 Tahun	45	21%
50-50 Tahun Keatas	15	7%
Jumlah	205	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020.

Berdasarkan pengalaman bekerja dan atau waktu responden selama bekerja, sebaran responden terdiri dari kurang lebih 5 tahun sebanyak 144 responden (70%), 6-10 tahun 44 responden (22%), 11-15 tahun 15 responden (7%) dan 16 hingga 16 tahun keatas sebanyak 2 responden (1%).

Tabel 4. 4

Data Responden Berdasarkan Pengalaman Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Presentasi
± 5 Tahun	144	70%
6-10 Tahun	44	22%
11-15 Tahun	15	7%
16-16 Tahun Keatas	2	1%
Jumlah	205	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

4.3.Hasil Pengujian

4.3.1. Hasil Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas Konvergen

Penelitian ini menggunakan ukuran nilai *loading faktor* dengan menampilkan nilai *outer loading* dan nilai *Averege Varience Expected* (AVE) awal dan akhir, yang dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 4.6.

Tabel 4. 5

Nilai *Outer Loading* dan *Averege Varience Expected* (AVE) Awal

Variabel	Indikator	*Outer Loading*	AVE
Sikap (*Attitude Toward Behavior*)	ATB1	0,710	0,650
	ATB2	0,857	
	ATB3	0,865	
	ATB4	0,778	
	ATB5	0,812	
	PBC1	0,805	

Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control*)	PBC2	0,763	0,602
	PBC3	0,796	
	PBC4	0,773	
	PBC5	0,742	
Tekanan Koersif (*Coercive Pressure*)	CP1	0,820	0,667
	CP2	0,817	
	CP3	0,847	
	CP4	0,809	
	CP5	0,791	
Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure)*	MP1	0,830	0,701
	MP2	0,811	
	MP3	0,895	
	MP4	0,793	
	MP5	0,853	
Tekanan Normatif (*Normative Pressure*)	NP1	0,548	0,579
	NP2	0,810	
	NP3	0,791	
	NP4	0,792	
	NP5	0,828	
Kesadaran Diri (*Self Awareness*)	SA1	0,739	0,632
	SA2	0,750	
	SA3	0,817	
	SA4	0,828	
	SA5	0,835	
Pencegahan Fraud (*Preventing Fraud*)	PF1	0,744	0,679
	PF2	0,841	
	PF3	0,818	
	PF4	0,858	
	PF5	0,854	

Sumber : Hasil Penelitian, 2020.

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen menunjukan bahwa nilai dari *outer loading* dari indikator konstruk memiliki nilai diatas 0,7 tidak terkecuali pada nilai indikator konstruk NP1. Indikator yang memiliki nilai kurang dari 0,7 dikatakan tidak valid sehingga perlu untuk dihilangkan karena apabila indikator tersebut tidak dihilangkan maka akan mempengaruhi nilai dari *composite reliability*.

Tabel 4. 6

Outer Loading dan *Average Variance Extracted* (AVE) Akhir

Variabel	Indikator	*Outer Loading*	AVE
Sikap (*Attitude Toward Behavior*)	ATB1	0,710	0,650
	ATB2	0,857	
	ATB3	0,865	
	ATB4	0,778	
	ATB5	0,812	
Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control*)	PBC1	0,805	0,602
	PBC2	0,763	
	PBC3	0,796	
	PBC4	0,773	
	PBC5	0,742	
Tekanan Koersif (*Coercive Pressure*)	CP1	0,820	0,667
	CP2	0,817	
	CP3	0,847	
	CP4	0,809	
	CP5	0,791	
Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure)*	MP1	0,820	0,701
	MP2	0,811	
	MP3	0,895	
	MP4	0,793	
	MP5	0,853	
Tekanan Normatif (*Normative Pressure*)	NP2	0,810	0,662
	NP3	0,795	
	NP4	0,803	
	NP5	0,842	
Kesadaran Diri (*Self Awareness*)	SA1	0,739	0,632
	SA2	0,750	
	SA3	0,817	
	SA4	0,828	
	SA5	0,835	
Pencegahan Fraud (*Preventing Fraud*)	PF1	0,744	0,679
	PF2	0,841	
	PF3	0,818	
	PF4	0,858	
	PF5	0,854	

Sumber : Hasil Penelitian, 2020.

Selain mengamati nilai dari *outer loading*, validitas konvergen juga dapat diketahui melalui nilai *Averege Varience Expected* (AVE) dan untuk masing-masing indikator dari nilai AVE direkomendasikan harus lebih besar dari 0,5. Berdasarkan data hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai AVE pada masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,5.

Pada pengelolaan data diawal terdapat nilai outer loading dibawah 0,7 yakni pada indikator pertanyaan NP1 dengan nilai loading sebesar 0,548. Setelah indikator pertanyaan dihilangkan maka semua nilai *outer loading* dan *Averege Varience Expected* (AVE) telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian validitas discriminant.

2. Uji Validitas Discriminant

Bagian ini akan menguraikan hasil dari pengujian *validitas discriminant*, uji *validitas discriminant* menggunakan nilai *cross loading*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *validitas discriminant* apabila nilai *cross loading* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,70. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui variabel konstruk yang bebeda dan tidak saling berhubungan. Berikut ini adalah nilai *cross loading* dari masing-masing indikator:

Tabel 4. 7

Nilai *Cross Loading*

X1:	ATB	X2:	PCB	X3:	CP	X4:	MP	X5:	NP	X6:	SA	X7:	PF
ATB1	0,710	PCB1	0,805	CP1	0,820	MP1	0,803	NP1		SA1	0,739	PF1	0,744
ATB2	0,857	PCB2	0,763	CP2	0,817	MP2	0,811	NP2	0,813	SA2	0,750	PF2	0,841
ATB3	0,865	PCB3	0,796	CP3	0,847	MP3	0,895	NP3	0,795	SA3	0,817	PF3	0,818
STB4	0,778	PCB4	0,773	CP4	0,809	MP4	0,793	NP4	0,805	SA4	0,828	PF4	0,859
ATB5	0,812	PCB5	0,742	CP5	0,791	MP5	0,853	NP5	0,842	SA5	0,835	PF5	0,854

Sumber : Hasil Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* yang besar yang dapat membentuk dan atau mendukung variabel. Dengan begitu indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki *validitas discriminant* yang baik dan telah memenuhi syarat.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukan seberapa akurat, konsisten serta tepat suatu variabel konstruk, (Ghozali & Latan, 2014). Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,70. Hasil pengolahan data pada penelitian ini menunjukan bahwa nilai *composite reliability* lebih dari 0,7. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4. 8

Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*

	Cronbach's Alpha	*Composite Reliability*
X1 : ATB	0,864	0,902
X2 : PBC	0,835	0,883
X3 : CP	0,875	0,909
X4 : MP	0,893	0,921
X5 : NP	0,830	0,887
X6 : SA	0,854	0,896
Y : PF	0,882	0,914

Sumber : Hasil Penelitian, 2020.

4.3.2. Hasil Pengujian Hipotesis

Uji hipotetsis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SmartPLS3. Uji hipotesis dilakukan pada ketujuh hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai dari *T-Statistic* dan nilai *P–Values* serta dengan melihat nilai *original* sample dari masing-masing hipotesis.

Tabel 4. 9

Hasil Uji Signifikansi

Variabel Bebas	Model 1			Model 2			Model 3			Model 4			Model 5		
	Original Sample	*T-Statistic*	*P-Value*	*Original Sample*	*T-Statistic*	*P-Value*	*Original Sample*	*T-Statistic*	*P-Value*	*Original Sample*	*T-Statistic*	*P-Value*	*Original Sample*	*T-Statistic*	*P-Value*
X1	0.255	3.264	0.001	-	-	-	0.119	1.523	0.128	-	-	-	-0.017	0.254	0.796
X2	0.549	7.076	0.000	-	-	-	0.368	3.899	0.000	-	-	-	0.197	2.372	0.018
X3	-	-	-	0.101	1.193	0.233	-	-	-	0.075	0.951	0.342	0.028	0.307	0.759
X4	-	-	-	0.431	3.774	0.000	-	-	-	0.372	3.231	0.001	0.345	3.145	0.002
X5	-	-	-	0.362	3.961	0.000	-	-	-	0.247	3.067	0.002	0.220	2.779	0.006
X6	-	-	-	-	-	-	0.405	5.156	0.000	0.251	3.060	0.002	0.203	2.331	0.020

Sumber : Hasil Penelitian (2020)

Menurut Ghozali & Latan, (2014), ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis dapat dideteksi dengan membandingkan antara nilai *T-statistik* dengan nilai *P-value*. Jika nilai *T-Statistic* lebih besar dibandingkan dengan nilai *P-Value* maka dapat diartikan bahwa suatu hipotesis terdukung atau diterima. Adapun untuk nilai *T-Statistic* ditentukan signifikansi yaitu sebesar 1,96 dan untuk nilai *P-Value* 0,05 (5%) sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang terdukung atau diterima ketika nilai *T-Statistic* > 1,96 dan nilai *P-Value* < 0,05.

Dengan demikian hasil uji hipotesis dapat dipaparkan sebagai berikut :

1) Uji Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah antara sikap (*attitude toward behavior*) berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian variabel sikap (*attitude toward behavior*) pada persamaan model pertama menunjukan bahwa sikap (*attitude toward behavior*) memperoleh nilai statistik 3.264 > 1.96 dan nilai *P-Values* 0.001 < 0,05 dengan original sampel 0.255. Pada persamaan model ke tiga memperoleh nilai statistik 1.523 < 1,96 dengan nilai original sampel 0,119 dan nilai *P-Value* sebesar 0.128 > 0.05, dan pada persamaan model ke lima memperoleh nilai statistik sebesar 0.254 < 1.96 dan nilai p-value sebesar 0.796 > 0.05.dengan nilai original sampel -0.017. Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa, persamaan model pertama sikap (*attitude toward behavior*) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*, persamaan model ke tiga sikap (*attitude toward behavior*) positif tidak berpengaruh signifikan pada pencegahan *fraud* dan pada persamaan model ke lima sikap (*attitude toward behavior*) tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.

2) Uji Hipotesis ke Dua

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan kontrol perilaku presepsian (*perceived behavioral control*) berpengaruh pada

keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian kontrol perilaku presepsian (*perceived behavioral control*) pada persamaan model pertama memperoleh nilai statistik sebesar 7.076 > 1.96 dan *P-Value* sebesar 0.000 < 0.05 dengan nilai original sampel 0.549. Persamaan model ketiga kontrol perilaku presepsian (*perceived behavioral control*) memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 3.899 > 1.96 dan nilai *P-Value* sebesar 0.000 < 0.05 dengan nilai original sampel 0.368 dan persamaan model ke lima kontrol perilaku presepsian (*perceived behavioral control*) memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 2.372 > 1.96 dan *p-value* sebesar 0.018 < 0.05 dengan orignal sampel sebesar 0.197. Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa pada persamaan model pertama, ketiga dan kelima kontrol perilaku presepsian (*perceived behavioral control*) berpengaruh positif signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud*.

3) Uji Hipotesis ke Tiga

Pengujian hipotesis ke tiga dilakukan untuk membuktikan tekanan koersif (*coercive pressure*) berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Hasil pengujian tekanan koersif (*coercive pressure*) yang dilakukan pada persamaan model kedua memperoleh nilai *t-statistik* sebesar 1.193 yang berarti < 1.96 dan nilai *P-Value* 0.233 > dari 0.05 dengan original sampel 0,101. Pada persamaan model ke empat tekanan koersif (*coercive pressure*) memperoleh nilai statistik sebesar 0.951 < 1.96 dan *P-Value* 0.342 > 0.05 dengan nilai original sampel 0.075 dan pada persamaan model ke lima *t-statistic* sebesar 0.307 < 1.96 dan nilai *p-value* sebesar 0.759 > 0.05 dengan nilai original sampel

0.028. Berdasarkan perolehan nilai setelah dilakukan pengujian seperti yang telah dijelskan, dapat disimpulkan bahwa pada persamaan model ke dua, ke empat dan ke lima tekanan koersif (*coercive pressure*) positif tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.

4) Uji Hipotesis ke Empat

Pengujian hipotesis ke empat dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan tekanan mimetik (*mimetic pressure*) berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada tekanan mimetik (*mimetic pressure*) pada persamaan model ke dua diperoleh nilai *t-statistic* sebesar 3.774 > 1.96 dan *P-Value* sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai original sampel 0,431. Pada pengujian persamaan model ke empat tekanan mimetik (*mimetic pressure*) memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 3.231 > dari 1.96 dan *P-Value* dengan nilai sebesar 0.001 < 0.05 dengan original sampel 0.372 dan pada pengujian ke lima tekanan mimetik (*mimetic pressure*) memperoleh nilai statistik sebesar 3.145 > 1.96 dan nilai *p-value* sebesar 0.002 < 0,05 dengan nilai original sampel sebesar 0.345. Dengan perolehan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa tekanan mimetik (*mimetic pressure*) pada persamaan model ke dua, ke empat dan ke lima positif berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada penggunaan dana desa.

5) Pengujian Hipotesis ke Lima

Pengujian hipotesis ke lima dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan tekanan normatif (*normative pressure*) berpengaruh terhadap

keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Pada pengujian persamaan model kedua tekanan normatif (*normative pressure*) memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 3.961 > 1.96 dan *p-value* sebesar 0.000 < 0.05 dengan original sampel 0.362. Pengujian persamaan model ke empat tekanan normatif (*normative pressure*) memperoleh nilai *t-statistik* sebesar 3.067 > 1.96 dan *p-value* 0.002 < 0.05 dengan original sampel 0.247 dan pada pengujian model ke lima tekanan normatif (*normative pressure*) *t-statistic* sebesar 2.779 > 1.96 dan nilai *P-Value* sebesar 0.006 < 0.05 dengan original sampel 0,220. Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan normatif (*normative pressure*) pada persamaan model kedua ke empat dan ke lima positif berpengaruh signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.

6) Pengujian hipotesis ke Enam

Pengujian hipotesis keenam dalam penelitian ini dilakukan untuk membuktikan kesadaran diri (*self awareness*) berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud*. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan pada persamaan model ke tiga kesadaran diri (*self awareness*) memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 5.156 > 1.96 dan nilai *P-Value* sebesar 0.000 < 0.05 dengan nilai original sampel 0.405. Pada persamaan model ke empat kesadaran diri (*self awareness*) memperoleh nilai *t-statistik* sebesar 3.060 > 1.96 dan *P-Value* sebesar 0.002 < 0.05 dengan nilai original sampel 0.251 dan pada persamaan model ke lima kesadaran diri (*self awareness*) memperoleh nilai t-statistik sebesar 2.331 > 1.96 dan nilai *P-Value* yang diperoleh sebesar 0.020 < 0.05 dengan nilai original sampel 0.203. Berdasarkan perolehan nilai setelah dilakukan pengujian setelah

yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara kesadaran diri (*self awareness*) dengan keinginan mencegah *fraud* pada persamaan model ke tiga, empat dan lima.

4.4.Pembahasan

1. Sikap (*Attitude Toward Behavior*) Berpengaruh Positif Terhadap Keinginan Mencegah *Fraud* pada Penggunaan Dana Desa

Hasil pengujian variabel sikap (*attitude tiward behavior*) berpengaruh positif signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa dalam persamaan model pertama. Sedangkan hasil pengujian persamaan model ke tiga dan model ke lima sikap (*attitude tiward behavior*) tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada model pertama sikap (*attitude toward behavior*) yang coba dikembangan dengan variabel moral dapat mempengaruhi keinginan mencegah *fraud*. Pada dasarnya moral merupakan penalaran seseorang terhadap suatu perilaku yang bersifat memberikan kesadaran kepada seseorang akan kewajiban dan tanggungjawabnya, Budingsih dalam (Udayani & Sari, 2017).

Berdasarkan jawaban dari hasil kuisioner yang telah diedarkan, rata-rata responden memberikan jawaban setuju akan pentingnya mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa dan *fraud* pada penggunaan dana desa dapat dicegah dengan menerapkan perilaku yang baik dan benar dalam bekerja seperti bekerja dengan jujur dan dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan. Dengan

jawaban yang diberikan tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap (*attitude toward behavior*) yang dikembangkan dengan moral aparatur pemerintah desa dapat meningkatkan kepekaannya terhadap kewajiban atau keharusan kewajiban atau keharusan seorang aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya dan akan meninggalkan perilaku yang dapat melanggar norma-norma yang berlaku. Hasil pengujian pada model pertama ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahimah dkk., (2018) menurutnya dengan semakin tinggi tingkat penalaran yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi juga niat seseorang tersebut melakukan perbuatan yang baik dan benar dan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, (2018) yang beranggapan bahwa seseorang akan cenderung malakukan suatu kebaikan atau sebaliknya berdasarkan tingkat penalaran moral yang ia miliki, karena pada dasarnya moral merupakan penalaran atau pandangan seseorang terhadap baik buruknya perilaku yang dapat diterima oleh semua pihak.

Setelah ditambahkan variabel kesadaran diri pada pengujian model ke tiga, sikap (*attitude toward behavior*) dinyatakan positif tidak berpengaruh signfikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Walaupun jawaban dari kuisioner menunjukan bahwa para apartur pemerintah desa menyadari akan pentingnya mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa namun jawaban tersebut tidak otomatis dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada penggunaan dana desa Hal ini dapat disebabkan rendahnya kesadaran pada diri aparatur pemerintah seperti adanya kesepakatan secara tersembunyi antar aparatur pemerintah desa, perjanjian dengan memberikan fasilitas tertentu dan lain sebagainya. Hal tersebut didukung oleh

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradana dkk., (2018) yang menyatakan bahwa moralitas bersifat privasi karena merupakan penalaran dari tiap-tiap individu sedangkan pencegahan *fraud* bersifat umum.

Pada model pengujian ke lima, sikap (*attitude toward behavior*) dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Hal ini dapat disebabkan oleh situasi yang tidak menentu yang sedang dirasakan atau dihadapi aparatur pemerintah desa seperti dihadapkan dengan situasi dimana ia harus menentukan keputusan tentang perilaku manakah yang tepat bagi dirinya, seperti tidak adanya transparansi terhadap penggunaan dana desa sebab diancam oleh pihak-pihak tertentu dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Udayani dan Sari, (2017) menurutnya tingkat penalaran moral seseorang akan mempengaruhi perilaku mereka. Seseorang yang memiliki tingkat penalaran moral yang rendah perilakunya akan berbeda dengan seseorang yang memiliki tingkat penalaran moral yang tinggi dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu. Apabila semakin tinggi tingkat penalaran moral seseorang maka ia cenderung tidak melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dan sebaliknya jika tingkat penalaran moral seseorang itu rendah maka ia akan cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).

2. Kontrol Perilaku Presepsian (*Perceived Behavioral Control*) Berpengaruh Positif Terhadap Keinginan Mencegah *Fraud* pada Penggunaan Dana Desa

Hasil pengujian variabel kontrol perilaku presepsian (*perceived behavioral control*) positif berpengaruh signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Variabel kontrol perilaku presepsian (*perceived behavioral control*) dalam penelitian ini dikembangkan dengan melihat perilaku etis yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa.

Berbeda dengan moral yang merupakan penalaran seseorang terhadap suatu perilaku yang akan dilakukan, perilaku etis merupakan cara seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan norma dan nilai yang telah berlaku. Berdasarkan jawaban dari responden, banyak dari responden yang memberikan jawaban setuju apabila mereka memiliki kendali atas segala perilaku yang akan mereka lakukan dan dengan memiliki perilaku etis mereka dapat menimbulkan keinginan mereka mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Apabila perilaku etis telah benar-benar dimiliki oleh aparatur pemerintah seperti perilaku yang benar, baik , adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran maka akan menutup kemungkinan terjadinya *fraud* dan jika aparatur telah memiliki perilaku etis maka ia akan dapat mengendalikan dirinya untuk berperilaku sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku.

Hasil pengujian yang telah dilakukan pada variabel kontrol perilaku

presepsian (*perceived behavioral control*) dari persamaan model pertama, ke tiga dan ke lima konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan perilaku etis sebagai variabel penelitian untuk mencegah *fraud* diantaranya dilakukan oleh Gaurina et al., (2017), Noviani dan Sambharakresna, (2014) dan Jamaliah Said dkk., (2017). Menurut Noviani & Sambharakresna, (2014) anggota organisasi yang memiliki perilaku etis dapat meningkatkan kinerja organisasi yang dimana hal tersebut juga dapat mengurangi serta mencegah terjadinya *fraud* dan menurut Jamailah Said dkk., (2018) seorang aggota atau karyawan yang memiliki perilaku etis cenderung akan mematuhi standar etika yang telah diterapkan, dengan begitu diharapkan agar dapat meningkatkan serta memperketat standar etika agar dapat mencegah *fraud*.

3. Tekanan Koersif (*Coercive Pressure*) Berpengaruh Positif Terhadap Keinginan Mencegah *Fraud* pada Penggunaan Dana Desa

Hasil pengujian variabel tekanan koersif (*coercive pressure*) positif tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa pada pengujian persamaan model ke dua, model ke empat dan ke lima. Pada penelitian ini tekanan koersif (*coercive pressure*) coba dikembangkan dengan melihat penerapan *good corporate governance* yang diterapkan dalam instatsi pemerintahan desa.

Berdasarkan jawaban dari responden, banyak yang memberikan respon setuju bahwa dengan menerapkan prinsip *good corporate governance* seperti akuntabilitas, transparansi serta pelayanan yang prima dapat mencegah terjadinya

fraud. Namun dari jawaban tersebut tidak otomatis memberikan pengaruh yang signifikan terhadap upaya pencegahan *fraud* pada penggunaan dana desa. Tidak berpengaruhnya *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dapat terjadi karena suatu instansi pemerintah desa tidak dapat menerapkan dengan baik nilai-nilai atau asas-asas dari kebijakan pemerintah, tidak benar-benar memahami kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah dan atau tidak adanya rasa takut terhadap sanksi-sanksi yang akan diperoleh.

Hasil dari pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, diantaranya oleh Hidayati & Widiastuti, (2019) yang menyatakan bahwa asas-asas dari *good corporate governance* sangat dibutuhkan untuk dapat mencegah tindakan *fraud* dan penelitian yang dilakukan oleh Beawiharta & Rahayu, (2014) juga menyatakan bahwa jika suatu instansi pemerintah benar-benar telah menerapkan dengan baik prinsip *good corporate governance* maka *fraud* akan mudah untuk dicegah.

4. Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*) Berpengaruh Positif Terhadap Keinginan Mencegah *Fraud* pada Penggunaan Dana Desa

Hasil pengujian variabel mimetik (*mimetic pressure*) berpengaruh positif signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa pada pengujian persamaan model ke dua, model ke empat dan ke lima. Tekanan mimetik (*mimetic pressure*) dalam penelitian ini coba dikembangkan dengan variabel pengendalian internal.

Dari hasil kuisioner yang telah dibagikan, rata-rata responden menjawab

setuju terhadap pernyataan bahwa telah dilakukannya review atas rencana dan hasil kerja yang telah dicapai, apabila terjadi kendala atau hal-hal lain diluar kendali maka mereka tidak segan untuk meminta bantuan atau saling berbagi informasi dengan instansi pemerintahan sejenis lainnya (kantor desa) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan telah melakukan pengawasan berkala, hingga melakukan review pada rencana hingga hasil kerja maka dapat dikatakan bahwa pengendalian internal pada instansi pemerintahan desa (kantor desa) dalam objek penelitian ini telah optimal diterapkan.

5. Tekanan Normatif (*Normative Pressure*) Berpengaruh Positif Terhadap Keinginan Pencegahan *Fraud* pada Penggunaan Dana Desa

Hasil pengujian variabel tekanan normatif (*normative pressure*) berpengaruh positif signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa pada pengujian persamaan ke dua, ke empat dan kelima. Tekanan normatif (*normative pressure*). Tekanan normatif (*normatif pressure*) dalam penelitian ini dikembangkan dengan melihat kompetensi atau tingkat kemahiran yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa, karena seperti yang dimaksudkan dalam penelitian ini bahwa tekanan normatif ialah bagaimana seorang aparatur pemerintah desa dapat bekerja dengan profesional agar dapat mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.

Dari hasil kuisioner yang telah dibagikan kepada aparatur pemerintah desa menyatakan bahwa dengan memiliki kemahiran serta kemampuan pada apa yang telah mereka kerjakan serta memahami dengan benar apa yang dikerjakan dapat

membantu pemerintahan desa dalam mencapai tujuannya dan dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa. Berdasarkan hasil pengujian yang telahb dilakukan pada persamaan model ke dua, modek ke empat dan ke lima hasilnya terbukti konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Huslina dkk., (2015) yang berpendapat bahwa seluruh anggota dalam suatu organisasi harus memiliki kompetensi pada bidang yang ia kerjakan agar pekerjaannya dapat di pertanggungjawabkan, dan menurut Atmadja dkk., (2017) kompetensi (kemampuan atau keahlian) penting untuk dimiliki agar dapat mencapai tujuan organisasi yang dapat meminimalisir serta terhindar dari *fraud*.

6. Kesadaran diri (*Self Awareness*) Berpengaruh Positif Terhadap Keinginan Mencegah Fraud pada Penggunaan Dana Desa

Hasil pengujian variabel kesadaran diri (*self awareness*) berpengaruh positif signifikan terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa pada pengujian persamaan model ke tiga, ke empat dan ke lima. Kesadaran diri (*self awareness*) yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah pemahaman aparatur pemerintah desa tentang pentingnya mencegah terjadinya *fraud* pada penggunaan dana desa dan coba dikembangkan dengan melihat kesadaran anti *fraud* pada aparatur pemerintah desa.

Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden, dapat disimpulkan bahwa para aparatur pemerintah desa sadar serta paham akan pentingnya mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa selain itu mereka juga mengontrol diri untuk menahan segala keinginan atau hasrat agar tidak terhasut melakukan

perbuatan yang dapat menimbulkan terjadinya *fraud*. Hal ini konsisten dengan dengan penelitian Yuniarti, (2017), menurutnya dengan meningkatkan kesadaran dan kepekaan seluruh anggota organisasi maka dapat mendukung suatu organisasi untuk mencegah terjadinya *fraud*. Akan tetapi hasil dari pengujian yang telah dilakukan pada model ini tidak konsisten dengan penelitian Wulandari dan Nuryanto, (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran anti *fraud* tidak memberikan ancaman serta tekanan kepada seseorang untuk tidak melakukan *fraud*.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) dan teori institusional (*institutional theory*) untuk menilai keperilakuan aparatur pemerintah desa dan suatu instansi pemerintahan desa dalam mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa. Responden dalam penelitian ini ialah aparatur pemerintah desa yang memiliki hubungan langsung dengan pengelolaan keuangan desa. berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa :

1. Sikap (*attitude toward behavior*) tidak konsisten berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.
2. Kontrol perilaku presepsian (*perceived behavior control*) konsisten berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.
3. Tekanan koersif (*coercive pressure)* tidak konsisten berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.
4. Tekanan mimetik (*mimetic pressure*) konsisten berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.
5. Tekanan normatif (*normative pressure*) konsisten berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.

6. Kesadaran diri (*self awareness)* konsisten berpengaruh terhadap keinginan mencegah *fraud* pada penggunaan dana desa.

5.2. Implikasi

1. Bagi Pemerintahan

Bagi para pemerintah diharapkan lebih mempertimbangkan faktor-faktor kontrol perilaku presepsian (*perceived behavior control*), tekanan mimetik (*mimetic pressure*), tekanan normatif (*normative pressure*) dan kesadaran diri (*self awareness*) karena berpengaruh signifikan terhadap keinginan untuk *fraud* pada penggunaan dana desa. Instansi pemerintahan desa harus dapat mengelola faktor-faktor tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat karena dengan memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan maka *fraud* akan lebih mudah utuk dicegah. Selain itu diharapkan bagi para pemerintah untuk dapat meningkatkan serta memperbaiki sikap (*attitude toward behavior*) dan Tekanan koersif (*coercive pressure*) karena tidak berpengaruh signifikan dan dapat memicu terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) pada penggunaan dana desa.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan untuk dapat memperhatikan dan mempertimbangkan faktor keperilakuan seperti sikap (*attitude toward behavior*), kontrol perilaku presepsian (*perceived behavior control*), tekanan koersif (*coercive pressure*), tekanan mimetik (*mimetic pressure*), tekanan normatif

(*normative pressure*) dan kesadaran diri (*self awareness*) yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada penggunaan dana desa. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang berlaku sebagai objek penerima layanan publik dari instansi pemerintahan desa dan objek yang merasakan manfaat dari penggunaan dana desa dapat mendeteksi adanya kecurangan dengan melihat dan menilai perilaku yang tercermin dari pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah desa, sehingga apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor keperilakuaan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa seperti sikap (*attitude toward behavior*), kontrol perilaku presepsian (*perceived behavior control*), tekanan koersif (*coercive pressure*), tekanan mimetik (*mimetic pressure*), tekanan normatif (*normative pressure*) dan kesadaran diri (*self awareness*) yang dapat berpengaruh signifikan dan tidak terhadap pencegahan *fraud* pada penggunaan dana desa. Penelitian ini juga membuktikan bahwa teori yang digunakan sudah sesuai dengan hasil pengujian yang telah dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu akuntansi auditing, dimana hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah bukti empiris faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencegahan *fraud* apabila dilihat dari sisi keperilakuan.

5.3. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan meneliti desa yang berkembang, maju dan mandiri.
2. Bagi penelitian selanjutnya agar menambah variabel moderasi sehingga dapat mengetahui besarnya pengaruh teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*), teori institusional (*institutional theory*) dan kesadaran diri (*self awareness*) terhadap pencegahan *fraud* pada penggunaan dana desa.

5.4. Keterbatasan Penelitian

1. Data dalam penelitian ini merupakan hasil dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner. Informasi yang diberikan oleh responden melalui kuisioner terkadang tidak menunjukkan jawaban yang mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi.
2. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor keperilakuan yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada penggunaan dana desa. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau memperluas topik penelitian terkait dengan pencegahan *fraud* pada penggunaan dana desa.

Daftar Pustaka

Adetiloye, K. A., Olokoyo, F. O., & Taiwo, J. N. (2016). Fraud Prevention and Internal Control in the Nigerian Banking System. *International Journal of Economics and Financial Issues*, *6*(3), 1172–1179.

Adminpemberdayaan. (2019). Evaluasi Perkembangan Desa. Retrieved from Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana website: https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/933/evaluasi-perkembangan-desa#:~:text=Desa Mandiri adalah Desa maju,dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES*, 179–211.

Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). *LAPORAN TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2018*.

Amrizal. (2004). *Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan*. Retrieved from http://bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/cegah_deteksi.pdf

Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach* (14th ed.). United States of America: New Jersey: Pretice-Hall.

Atmadja, A. T., Adi, K., & Saputra, K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *12*(1), 7–16. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i01.p02

Bappenas, & BPS. (2015). *Indeks Pembangunan Desa 2014*. Indonesia.

Basuki Hadiprajitno, P. T., & Amal, M. I. (2019). Social constructs in predicting corruptive attitudes and behavior from theory of planned behavior perspective. *International Journal of Economics and Business Administration*, *7*(3), 167–177.

Beawiharta, I., & Rahayu, S. (2014). PENGARUH PERAN INSPEKTORAT PEMBANTU KOTA DAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2014. *E-Proceeding of Management*, *1*(3), 226–237.

Brignall, S., & Modell, S. (2000). An institutional perspective on performance measurement and management in the “new public sector.” *Management Accounting Research*, *11*(3), 281–306. https://doi.org/10.1006/mare.2000.0136

Darono, A., Nugroho, L. E., & Najib, W. (2013). Tinjauan Interpretatif Terhadap Aspek-Aspek Institusional dalam Implementasi Layanan Elektronik : Studi Kasus PT . XYZ. *Jnteti*, *2*(4), 29–36.

Dennis, A. P., & Ogoun, S. (2018). The effects of corporate governance codes in curbing fraudulent activities in private organisations in Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, *10*(7), 85–95. https://doi.org/10.5897/JAT2018.0307

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields Author (s): Paul J . DiMaggio and Walter W . Powell Published by : American Sociological Association Stable URL : http://www.jstor.org/stable/2095101. *American Sociological Review*, *48*(2), 147–160.

Dura, J. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, *10*(2), 26–32. https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70

Fardian, D. (2005). PENGARUH FAKTOR POLITIK, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris atas SKPD Pemerintah Kota Padang). *Skripsi Universitas Dponegoro*, 1–18.

Gaurina, N. P. M., Purnamawati, I. G. A., & Atmadja, A. T. (2017). PENGARUH PERSEPSI KARYAWAN MENGENAI PERILAKU ETIS DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (Studi Kasus Pada Bali Hai Cruises). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, *8*(2).

Ghozali, I., & Latan, H. (2014). *PARTIAL LEAST SQUARES KONSEP, TEKNIK DAN APLIKASI Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris* (2nd ed.). Semarang: Badan Penerbit - UNDIP.

Goleman, D. (1999). *Working With Emotional Intelegence: Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Goleman, D. (2010). *Emotional Intelligence KECERDASAN EMOSIONAL Mengapa EI lebih penting daripada IQ* (9th ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Gudono. (2017). *Teori Organisasi* (4th ed.; Mutya, Ed.). Yogyakarta: ANDI.

Halbouni, S. S., Obeid, N., & Garbou, A. (2016). CORPORATE GOVERNANCE AND INFORMATION TECHNOLOGY IN FRAUD PREVENTION AND DETECTION : EVIDENCE FROM THE UAE. *Managerial Auditing Journal*, *31*(6/7). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/MAJ-02-2015-1163

Hidayati, F. K., & Widiastuti, H. (2019). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP TINDAK. *Seminar Nasional Dan The 6th Call for Syariah*, 571–584.

Humas DJPK. (n.d.). Bagaimana Penggunaan Dana Desa? Retrieved January 26, 2020, from KEMENTRIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN website: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-penggunaan-dana-desa

Humas DJPK. (2018). Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran 2018. Retrieved January 10, 2018, from KEMENTERIAN KEUANGAN. DIREKTORAN JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN website: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800

Huslina, H., Islahuddin, & Syah, N. (2015). PENGARUH INTEGRITAS APARATUR, KOMPETENSI APARATUR, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENCEGAHAN FRAUD. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, *4*(1), 55–64.

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bismis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

Irawan, N. (2019). *TATA KELOLA PEMERINTAH DESA ERA UU DESA* (2nd ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jannah, S. F. (2016). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI SURABAYA). *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, *7*(2), 177–191. Retrieved from http://journal.unesa.ac.id/php.index/a

Johnson, E. N., Kidwell, L. A., Lowe, D. J., & Reckers, P. M. J. (2017). Who Follows the Unethical Leader ? The Association Between Followers ' Personal Characteristics and Intentions to Comply in Committing Organizational Fraud. *Journal of Business Ethics*. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3457-y

Kartika, R. S. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, *04*(03), 179–188. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188

Kartikaningrum, S. (2018). *No Titlei PENGARUH SPIRITUALITAS DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP BUDAYA ORGANISASI UNTUK PENCEGAHAN KECURANGAN (Studi Empiris pada Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta)*. Universitas Islam Indonesia.

Khairunnisa, H. (2017). *SELF ESTEEM, SELF AWARENESS DAN PERILAKU ASERTIF PADA REMAJA*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Krell, K., Matook, S., & Rohde, F. (2016). The impact of legitimacy-based motives on IS adoption success: An institutional theory perspective. *Information and Management*, *53*(6), 683–697. https://doi.org/10.1016/j.im.2016.02.006

M.Tuanakotta, T. (2010). *AKUNTANSI FORENSIK & AUDIT INVESTIGATIF* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.

M.Tuanakotta, T. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.

Maharani, L., & Mustika, M. (2016). HUBUNGAN SELF AWARENESS DENGAN KEDISIPLINAN PESERTA DIDIK KELAS VIII DI SMP WIYATAMA BANDAR LAMPUNG (Penelitian Korelasional Bidang BK Pribadi). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *03*(1), 17–31.

Mohamad Hardi. (2016). *Pencegahan Fraud (Kecurangan)*. Retrieved from https://itjen.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Pencegahan-Fraud_15122016.pdf

Noviani, D. P., & Sambharakresna, Y. (2014). PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM ORGANISASI PEMERINTAHAN. *JAFFA (Journal of Auditing, Finance and Forensic Accounting)*, *02*(2), 61–70.

Onza, G. D., & Lamboglia, R. (2011). THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE CHARACTERISTICS AND FINANCIAL STATEMENT FRAUDS : AN EMPIRICAL ANALYSIS OF ITALIAN LISTED COMPANIES. *International Journal for Management Science and Technology*, *2*(3), 14–15.

Pamungkas, I. D. (2014). Pengaruh religiusitas dan rasionalisasi dalam mencegah dan mendeteksi kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *15*(2), 48–59.

Peltier-Rivest, D., & Lanoue, N. (2015). THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL AND INDIVIDUAL MORALITY ON THE TENDENCY OF ACCOUNTING FRAUD. *Journal of Financial Crime*, *22*(3), 295–304. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/JFC-11-2013-0064

Pradana, H. H. E., Almaududi, Y. H., & Prasetya, M. D. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas dan Integritas terhadap Pencegahan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, *25*(2), 104–111.

Purnamasari, P., & Amaliah, I. (2015). Fraud prevention : relevance to religiosity and spirituality in the workplace. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *211*(September), 827–835. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.109

Puspasari, N., & Suwardi, E. (2016). THE EFFECT OF INDIVIDUAL MORALITY AND INTERNAL CONTROL ON THE PROPENSITY TO COMMIT FRAUD : *Journal of Indonesian Economy and Business*, *31*(2), 208–219.

Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DESA, LINGKUNGAN PENGENDALIAN dan MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD YANG TERJADI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, *6*(12), 139–154.

Reichborn-Kjennerud, K., González-Díaz, B., Bracci, E., Carrington, T., Hathaway, J., Jeppesen, K. K., & Steccolini, I. (2019). Sais work against corruption in Scandinavian, South-European and African countries: An institutional analysis. *British Accounting Review*, *51*(5). https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.100842

Respati, N. W. T. (2011). PENGARUH LOCUS OF CONTROL TERHADAP HUBUNGAN SIKAP MANAJER, NORMA-NORMA SUBYEKTIF, KENDALI PERILAKU PERSEPSIAN, DAN INTENSI MANAJER DALAM MELAKUKAN KECURANGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *8*(2), 123–140.

Rusli Zulfian. (2017). ANALISIS IMPELENTASI DAMA DESA DI WILAYAH

MALUKU UTARA. *Indonesian Treasury Review*, *2*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v2i3.33

Said, Jamailah, Arsy, S., Rafidi, M., Obaid, R. R., & Alam, M. M. (2018). Integrating Religiosity into Fraud Triangle Theory : Empirical Findings from Enforcement Officers. *GJAT (Global Journal Al-Thaqafah)*, (January), 131–144. Retrieved from http://www.gjat.my/gjat2018si/SI2018

Said, Jamaliah, Alam, M. M., Ramli, M., & Rafidi, M. (2017). Integrating ethical values into fraud triangle theory in assessing employee fraud : Evidence from the Malaysian banking industry. *Journal of International Studies*, *10*(2), 170–184. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-2/13

Saleh, M. (2016). EFFECT OF INTERNAL CONTROL ON FRAUD PREVENTION OF THE LISTED MANUFACTURING INDUSTRIES IN NIGERIA. *International Journal of Business and Management*, *12*(2), 2016. https://doi.org/10.5539/ijm.v12n2p151

Salleh, S. M., & Othman, R. (2016). Board of Director's Attributes as Deterrence to Corporate Feayd. *Procedia - Economics and Finance*, *35*(16), 82–91. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00012-5

Sari, R. C. (2017). *Akuntansi Keperilakuan* (1st ed.). Yogyakarta: ANDI.

Sastrawinata, H. (2011). PENGARUH KESADARAN DIRI, PENGATURAN DIRI, MOTIVASI, EMPATI, DAN KETERAMPILAN SOSIAL TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA KAP DI KOTA PALEMBANG Oleh: *SOSIALITA. Jurnal Ilmu Administrasi*, *1*(2). Retrieved from http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/JIA/issue/view/54

Setiawan, S. (2018). THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL AND INDIVIDUAL MORALITY. *Asia Pasific Fraud Journal*, *3*(1), 33–41. https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.04

Sow, A. N., Basiruddin, R., Mohammad, J., & Rasyid, S. Z. A. (2017). Fraud prevention in Malaysian small and medium enterprises (SMEs). *Journal of Financial Crime*.

Suastawan, I. M. I. D. P., Sujana, E., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI , PROACTIVE FRAUD AUDIT , DAN WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA BOS (Studi Empiris Pada sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, *7*(1).

Sudarmo, Sawardi, & Yulianto, A. (2008). *Fraud auditing* (5th ed.). Jakarta: Pusdiklat BPKP.

Sugiono. (2015). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D* (22nd ed.). Bandung: ALFABETA.

Sunaryanto, A., Sjafrina, A., & Primayogha, E. (2018). *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*.

Udayani, & Sari. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, *18*, 1774–1799.

Wahyuni, N. E., & Adam, H. (2013). ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DALAM PERSPEKTIF TEORI INSTITUSIONAL: STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA MALANG. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UNIVERSITAS BRAWIJAYA*, *4*(1). Retrieved from https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2512/2282

Wardana, I. G. A. K., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL , WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN MORALITAS APARAT TERHADAP PENCEGAHAN. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, *8*(2).

Wulandari, D. N., & Nuryanto, M. (2018). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KESADARAN ANTI-FRAUD, INTEGRITAS, INDEPENDENSI, DAN PROFESIONALISME TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN. *JRAMB (Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana)*, *4*(2), 117–125.

Yuniarti, R. D. (2017). The effect of internal control and anti-fraud awareness on fraud prevention (A survey on inter-governmental organizations). *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, *20*(1), 113–124. https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.626

Zulaikha, Z., & Hadiprajitno, P. T. B. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *13*(2), 194–220. https://doi.org/10.21002/jaki.2016.11

LAMPIRAN

PENELITIAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian

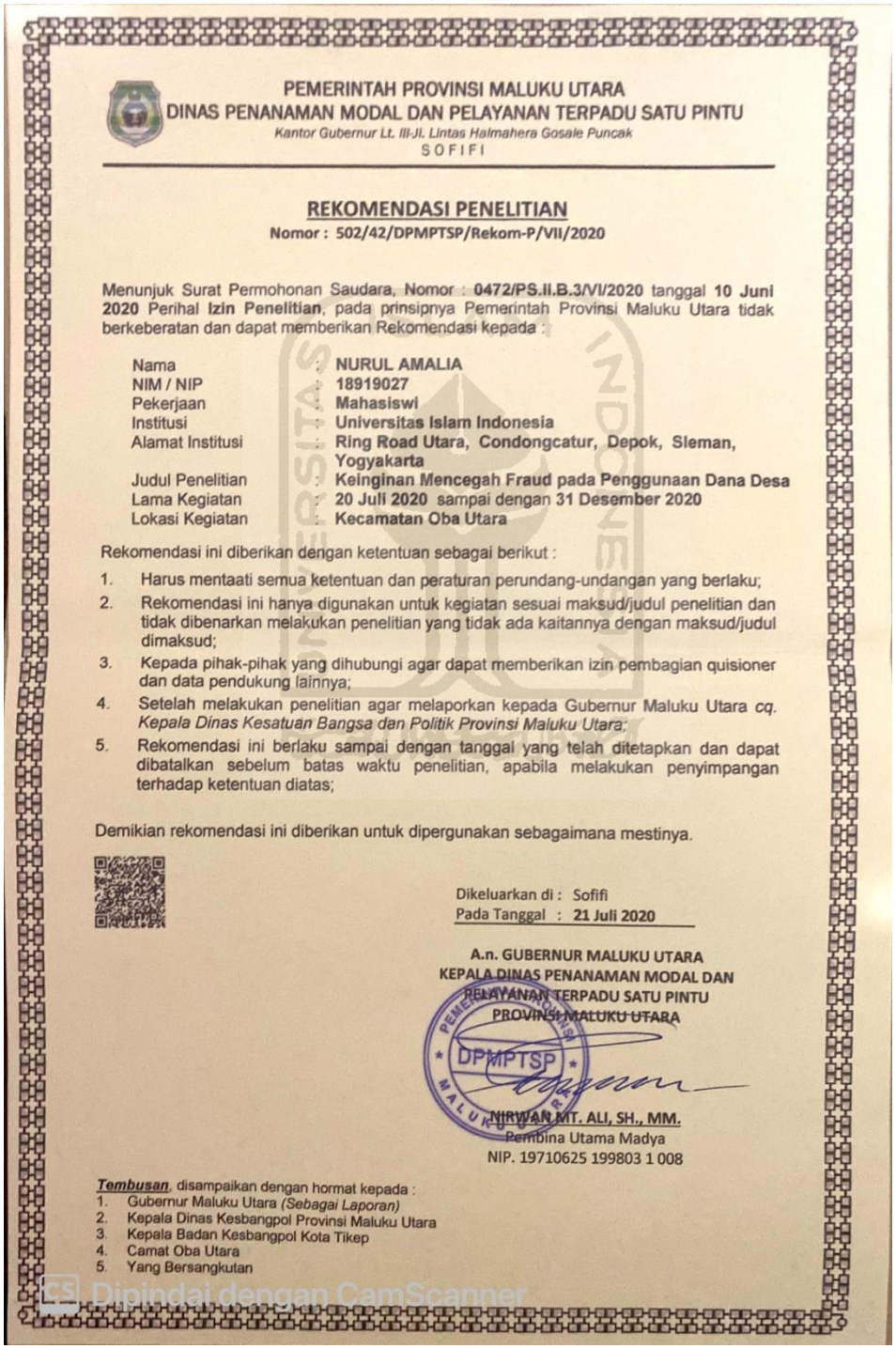

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kantor Gubernur Lt. III-Jl. Lintas Halmahera Gosale Puncak
SOFIFI

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 502/42/DPMPTSP/Rekom-P/VII/2020

Menunjuk Surat Permohonan Saudara, Nomor : **0472/PS.II.B.3/VI/2020** tanggal **10 Juni 2020** Perihal **Izin Penelitian**, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak berkeberatan dan dapat memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	**NURUL AMALIA**
NIM / NIP	:	**18919027**
Pekerjaan	:	**Mahasiswi**
Institusi	:	**Universitas Islam Indonesia**
Alamat Institusi	:	**Ring Road Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta**
Judul Penelitian	:	**Keinginan Mencegah Fraud pada Penggunaan Dana Desa**
Lama Kegiatan	:	**20 Juli 2020** sampai dengan **31 Desember 2020**
Lokasi Kegiatan	:	**Kecamatan Oba Utara**

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Rekomendasi ini hanya digunakan untuk kegiatan sesuai maksud/judul penelitian dan tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan maksud/judul dimaksud;
3. Kepada pihak-pihak yang dihubungi agar dapat memberikan izin pembagian quisioner dan data pendukung lainnya;
4. Setelah melakukan penelitian agar melaporkan kepada Gubernur Maluku Utara *cq. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara;*
5. Rekomendasi ini berlaku sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan dan dapat dibatalkan sebelum batas waktu penelitian, apabila melakukan penyimpangan terhadap ketentuan diatas;

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sofifi
Pada Tanggal : **21 Juli 2020**

A.n. GUBERNUR MALUKU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA

DPMPTSP

NIRWAN MT. ALI, SH., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19710625 199803 1 008

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :
1. Gubernur Maluku Utara *(Sebagai Laporan)*
2. Kepala Dinas Kesbangpol Provinsi Maluku Utara
3. Kepala Badan Kesbangpol Kota Tikep
4. Camat Oba Utara
5. Yang Bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Responden

di Tempat

Sehubungan untuk memenuhi tugas akhir (tesis) sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia, saya bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul : **"Keinginan Mencegah *Fraud* Pada Penggunaan Dana Desa"**

Saya memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini dengan mengisi kuisioner secara jujur dan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Seluruh data dan atau informasi yang diperoleh dari jawaban atas kuisioner semata-mata hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini. Semua jawaban dalam kuisioner akan sangat dijaga kerahasiannya oleh peneliti.

Demikian kuesioner ini saya sampaikan. Atas bantuan dan waktu yang Bapak / Ibu berikan saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Nurul Amalia

Petunjuk Pengisian

Silahkan menjawab dengan memberi tanda centang (✓) / *check list* pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi sebenarnya menurut anda pada salah satu kolom pilihan jawaban yang telah tersedia.

Bagian 1 **Data Responden**

Identitas Responden

1. Jenis Kelamin : ☐Pria ☐Wanita

2. Kelompok Usia : ☐ ± 20Tahun ☐40-49 Tahun
   ☐ 20-29 Tahun ☐ > 49 Tahun
   ☐ 30-30 Tahun

3. Latar Belakang Pendidikan : ☐ ± SMA ☐ Strata 2 (S2)
   ☐ Diploma 3 (D3) ☐ Strata 3 (S3)
   ☐ Strata 1 (S1) ☐ Lainnya
   (sebutkan).....

4. Pengalaman Bekerja : ☐ < 5 Tahun ☐ 11-15 Tahun
   ☐ 6-10 Tahun ☐ > 16 Tahun

5. Posisi/Jabatan : ☐ Kepala Desa ☐ Bendahara Desa
   ☐ Sekertaris Desa ☐ Kepala Urusan

Petunjuk Pengisian

Silahkan menjawab dengan memberi tanda centang (✓) / *check list* pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi sebenarnya menurut anda pada salah satu kolom pilihan jawaban yang telah tersedia.

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

R : Ragu-Ragu

TS :Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Bagian 2	**Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward Behaviour*)**	**SS**	**S**	**R**	**TS**	**STS**
1.	Bagi saya melakukan tindakan mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa merupakan perbuatan yang baik dan menguntungkan.					
2.	Bagi saya melakukan tindakan mencegah kecurangan dapat memberikan manfaat pada penggunaan dana desa.					
3.	Bagi saya melakukan suatu tindakan / pekerjaan dengan baik dan benar dalam penggunaan anggaran dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
4.	Bagi saya bekerja dengan jujur merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
5.	Bagi saya tanggung jawab merupakan wujud dari kewajiban yang telah dilakukan untuk mencegah kecurangan pada penggunaan dana					

	desa.					

Bagian 3	**Kontrol Perilaku Presepsian (*Perceived Behavioral Control*)**	**SS**	**S**	**R**	**TS**	**STS**
1.	Saya menyadari bahwa perilaku etis dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
2.	Saya memiliki kendali penuh pada diri saya sendiri untuk dapat berperilaku dengan etis agar dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
3.	Saya menyadari bahwa perilaku etis sangat penting untuk diterapkan dalam organisasi untuk mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
4.	Saya berada dilingkungan yang selalu mengingatkan saya untuk mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
5.	Saya merasa memiliki kemudahan untuk menyampaikan adanya tindakan kecurangan pada penggunaan dana desa.					

Bagian 4	**Tekanan Koersif (*Coercife Pressure*)**	**SS**	**S**	**R**	**TS**	**STS**
1.	Adanya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan dan penggunaan dana yang dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					

2.	Informasi penggunaan anggaran dan realisasi dana yang disediakan telah sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan dapat mendorong tindakan mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
3.	Informasi penggunaan anggaran dan realisasi dana dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
4.	Pelaporan dan pengelolaan dana desa telah sesuai dengan aturan / undang-undang yang berlaku dapat dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
5.	Tugas pokok penggunaan anggaran dan realisasi dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan aturan / undang-undang yang berlaku sehingga dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					

Bagian 5	**Tekanan Mimetik (*Mimetic Pressure*)**	**SS**	**S**	**R**	**TS**	**STS**
1.	Terdapat struktur organisasi yang jelas dalam pemberian tugas, wewenang dan tanggung jawab dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
2.	Terdapat alur yang jelas untuk masing-masing jenis pekerjaan dalam penggunaan anggaran dan realisasi dana dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					

3.	Terdapat tujuan dan rencana yang jelas pada penggunaan serta pengelolaan anggaran dan realisasi dana desa					
4.	Penggunaan anggaran dan realisasi penggunaan dana desa telah digunakan dengan efektif dan efisien dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
5.	Melakukan review atas rencana dan hasil kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan serta pengelolaan dana desa dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					

Bagian 6	**Tekanan Normatif (*Normative Pressure*)**	**SS**	**S**	**R**	**TS**	**STS**
1.	Latar belakang pendidikan yang dimiliki sesuai dengan bidang pekerjaan dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
2.	Memahami apa yang dikerjakan dapat membantu organisasi mencapai tujuannya akan mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
3.	Memiliki kemahiran dan kemampuan pada apa yang dikerjakan dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
4.	Mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan atau *skill* dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
5.	Mampu menerapkan pengetahuan yang didapat selama pelatihan pada penggunaan dan pengelolaan dana desa					

Bagian 7	**Kesadaran Diri (*Self Awareness*)**	**SS**	**S**	**R**	**TS**	**STS**
1.	Menyadari pentingnya mecegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
2.	Terdapat kebijakan anti kecurangan yang diterapkan dalam organisasi untuk mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
3.	Menerapkan kebijakan anti kecurangan ke dalam diri sendiri untuk menumbuhkan kesadaran mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
4.	Implikasi dari penerapan kebijakan anti kecurangan dapat mencesgah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
5.	Evaluasi diri terhadap pentingnya mencegah diri dari tindakan atau perbuatan kecurangan dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa					

Bagian 8	**Pencegahan Kecurangan (*Preventing Fraud*)**	**SS**	**S**	**R**	**TS**	**STS**
1.	Mengetahui serta memahami kode etik / panduan / pedoman / aturan yang berlaku dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dan dana desa					
2.	Kode etik / panduan / pedoman / aturan yang mengatur tentang penggunaan dana desa mudah untuk dimengerti dan ditaati dan mampu mencegah kecurangan pada penggunaan dana					

	desa					
3.	Menyadari bentuk-bentuk tindakan yang dapat mendorong melakukan praktik-praktik yang tidak lazim / mencurigakan dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					
4.	Mengetahui jenis-jenis sanksi yang akan diperoleh apabila melakukan praktik-praktik yang tidak lazim / mencurigakan dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa pada penggunaan dana desa.					
5.	Sanksi yang tegas yang akan diberikan apabila melanggar segala bentuk praktik yang tidak lazim / mencurigakan / melanggar peraturan dapat mencegah kecurangan pada penggunaan dana desa.					

Lampiran 4

TABULASI DATA

Resp	JK	Kelompok Usia	LB Pendidikan	Lama Bekerja	Posisi/Jabatan	ATB1	ATB2	ATB3	ATB4	ATB5	PBC1	PBC2	PBC3	PBC4	PBC5
1	P	40-49 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
2	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
3	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	3	4	3	4	4	4	4	4	4
6	P	40-49 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4
8	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris	5	5	5	5	5	2	2	2	4	4
9	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4
10	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4
11	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4
12	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5
13	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	W	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	P	49 Tahun Keatas	SMA	16 Tahun	Kepala Desa	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4

17	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4
19	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5
21	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
22	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	P	40-49 Tahun	S1	16 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
24	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	5	5	5	4	3	3	4	4
25	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
26	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	2	4	4	4	4
27	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5
28	W	49 Tahun Keatas	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4
29	P	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
31	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4
32	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
33	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
34	W	20-29 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4
35	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4
36	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
37	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4

38	W	40-49 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	4	5	4	5	2	4	2	5	4
39	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
40	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
41	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5
42	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
43	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	3	4	4	5	4	4	4	5	5	5
44	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4
45	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4
46	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4
47	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Sekertaris Desa	5	4	4	5	4	4	3	4	3	3
48	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
49	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
50	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4
51	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	3	2	2	4	4	4	4	4	4	4
52	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	2	5	5	5	5	4	4	4	5	5
53	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
54	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	3	2	2	4	4	5	5	5	5	5
55	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3
56	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3
57	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3
58	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3
59	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3
60	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Staff	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3
61	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

62	P	30-39 Tahun	D3	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
63	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
64	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	W	40-49 Tahun	D3	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4
74	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
75	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
76	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4
77	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5
79	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
80	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
81	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4
82	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
83	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4
84	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4

85	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
86	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4
87	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4
88	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Desa	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4
89	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	5	4	3	5	4	4
90	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4
92	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5
93	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
95	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
96	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5
97	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4
98	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
99	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
100	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5
101	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Staff	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4
102	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4
103	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
104	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
105	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
106	p	40-49 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
107	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

108	W	30-39 Tahun	D3	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
109	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
110	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
111	W	20-29 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
112	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Desa	1	5	5	4	5	4	5	5	5	5
113	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4
114	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
115	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5
117	P	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4
118	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
119	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
120	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
121	W	30-39 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
122	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
123	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
124	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5
125	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4
126	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
127	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
128	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4
129	P	40-49 Tahun	D3	5 Tahun	Kepala Urusan 3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
130	P	49 Tahun Keatas	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

131	P	49 Tahun Keatas	S1	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
132	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
133	W	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
134	P	49 Tahun Keatas	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
135	P	49 Tahun Keatas	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
136	P	40-49 Tahun	S1	16 Tahun	Kepala Desa	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4
137	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4
139	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4
140	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4
142	W	20-29 Tahun	D3	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
144	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
145	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5
146	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4
147	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Staff	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3
148	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4
149	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4
150	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4
151	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

152	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
154	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
155	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
156	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4
158	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5
159	W	20-29 Tahun	D3	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4
160	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4
161	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5
162	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4
163	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
164	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
165	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
166	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
167	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
168	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5
169	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4
170	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
171	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
172	P	30-39 Tahun	D3	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
174	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
175	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

176	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
177	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
178	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
179	W	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
180	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
181	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
182	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
183	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
184	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
185	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
186	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
187	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Sekertaris Desa	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5
188	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
189	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4
190	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
191	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
192	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
193	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
194	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4
195	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
196	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
197	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5
198	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4
199	P	40-49 Tahun	SMP	11-15 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4

200	W	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	4	5	5	5	5	3	4	3	4	4
201	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
202	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	5	5	5	5	3	4	3	4	4
203	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4
204	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
205	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Resp	JK	Kelompok Usia	LB Pendidikan	Lama Bekerja	Posisi/Jabatan	CP 1	CP 2	CP 3	CP 4	CP 5	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5
1	P	40-49 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
2	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4
3	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5
6	P	40-49 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5

11	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
13	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	W	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	P	49 Tahun Keatas	SMA	16 Tahun	Kepala Desa	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5
17	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
19	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4
21	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4
22	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	P	40-49 Tahun	S1	16 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4
25	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4

26	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4
28	W	49 Tahun Keatas	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5
29	P	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5
30	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5
31	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5
32	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
33	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
34	W	20-29 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4
35	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5
36	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
37	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4
38	W	40-49 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5
39	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4

					2										
41	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5
42	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
43	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
44	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4
45	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5
46	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5
47	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4
49	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
50	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4
51	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
53	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
54	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
55	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

56	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	3	4	4	5	5	4	5	4
62	P	30-39 Tahun	D3	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4
63	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
64	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
71	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

72	W	40-49 Tahun	D3	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
74	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
75	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
76	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4
77	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5
79	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
80	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
81	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4
82	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
83	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
84	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
85	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4
86	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5

87	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
88	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
89	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4
90	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4
92	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5
93	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5
95	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5
96	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5
97	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
98	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
99	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5
100	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
101	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Staff	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
102	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

103	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
104	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 2	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4
105	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
106	p	40-49 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
107	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
108	W	30-39 Tahun	D3	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
109	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
110	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
111	W	20-29 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
112	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4
113	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
114	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
115	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
116	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
117	P	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4

118	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
119	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
120	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
121	W	30-39 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
122	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
123	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
124	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4
125	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5
126	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
127	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
128	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4
129	P	40-49 Tahun	D3	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
130	P	49 Tahun Keatas	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
131	P	49 Tahun Keatas	S1	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
132	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

133	W	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
134	P	49 Tahun Keatas	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
135	P	49 Tahun Keatas	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
136	P	40-49 Tahun	S1	16 Tahun	Kepala Desa	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4
137	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
139	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
140	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142	W	20-29 Tahun	D3	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5
144	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
145	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5
146	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5
147	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Staff	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4

148	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4
149	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4
150	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4
151	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
152	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
154	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
155	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
156	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4
158	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4
159	W	20-29 Tahun	D3	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4
160	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5
161	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5
162	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5
163	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
164	P	40-49 Tahun	SMA	11-15	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

				Tahun											
165	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
166	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
167	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
168	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4
169	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
170	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
171	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
172	P	30-39 Tahun	D3	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
174	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
175	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
176	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
177	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
178	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
179	W	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

180	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
181	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
182	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
183	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
184	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
185	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
186	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
187	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4
188	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4
189	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4
190	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
191	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
192	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
193	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
194	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
195	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3

					1										
196	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4
197	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4
198	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
199	P	40-49 Tahun	SMP	11-15 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5
200	W	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	4	4	4	4	3	4	4	5	4
201	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5
202	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	4	4	4	4	3	4	4	5	4
203	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
204	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
205	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

No	JK	Kelompok Usia	LB Pendidikan	Lama Bekerja	Posisi/Jabatan	NP 1	NP 2	NP 3	NP 4	NP 5	SA 1	SA 2	SA 3	SA 4	SA 5
1	P	40-49 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5
2	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4

3	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
4	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
5	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	P	40-49 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
8	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
9	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	2	5	3	3	4	5	5	4	4	5
11	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
12	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	3	3	4	5	4	5	4	5	4	4
13	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	W	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	P	49 Tahun Keatas	SMA	16 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

18	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5
19	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	3	4	3	3	4	5	5	4	4	4
22	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	P	40-49 Tahun	S1	16 Tahun	Sekertaris Desa	3	4	4	3	4	5	4	4	4	4
24	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4
25	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	3	4	4	4	4	5	4	5	4	5
27	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4
28	W	49 Tahun Keatas	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5
29	P	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4
30	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	P	49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5

		Keatas													
32	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	3	3	4	5	4	4	4	4
33	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5
34	W	20-29 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Desa	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4
37	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4
38	W	40-49 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	2	4	4	5	4	4	2	4	4	4
39	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5
43	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4
44	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4

					Urusan 2										
46	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5
47	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Sekertaris Desa	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5
48	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 1	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4
49	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5
51	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
54	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	5	4	4	4	3	5	4	5
56	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	5	4	4	4	3	5	4	5
57	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	5	4	4	4	3	5	4	5
58	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	5	4	4	4	3	5	4	5
59	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	5	4	4	4	3	5	4	5

60	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Staff	4	4	5	4	4	4	3	5	4	5
61	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4
62	P	30-39 Tahun	D3	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
63	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5
64	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4
65	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	p	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
68	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	W	40-49 Tahun	D3	5 Tahun	Kepala Urusan 3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5
74	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5

75	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4
76	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4
77	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5
79	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
80	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
81	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4
82	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4
83	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4
84	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4
85	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4
86	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4
87	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4
88	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Desa	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
89	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4

90	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5
92	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5
93	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
95	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5
96	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5
97	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4
98	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
99	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5
100	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5
101	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Staff	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
102	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
103	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

104	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
105	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106	p	40-49 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
107	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
108	W	30-39 Tahun	D3	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
109	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
110	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
111	W	20-29 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
112	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5
113	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	5	4	2	4	2	4	4	2
114	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
115	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
116	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
117	P	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4

118	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
119	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
120	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
121	W	30-39 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
122	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
123	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
124	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
125	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4
126	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
127	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
128	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4
129	P	40-49 Tahun	D3	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
130	P	49 Tahun Keatas	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
131	P	49 Tahun Keatas	S1	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

132	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
133	W	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
134	P	49 Tahun Keatas	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
135	P	49 Tahun Keatas	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
136	P	40-49 Tahun	S1	16 Tahun	Kepala Desa	1	4	5	5	5	5	5	5	4	5
137	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	1	4	5	4	4	4	4	5	4	4
139	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
140	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	2	4	4	4	4	4	4	5	4	4
142	W	20-29 Tahun	D3	5 Tahun	Bendahara Desa	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4
143	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
144	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
145	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4

					Urusan 2										
146	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
147	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Staff	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5
148	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5
149	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5
150	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5
151	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
152	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
154	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
155	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
156	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	3	4	4	4	5	5	3	4	4	4
158	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	3	4	4	4	3	5	3	4	4	4
159	W	20-29 Tahun	D3	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5
160	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4

161	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4
162	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4
163	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Staff	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4
164	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
165	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
166	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
167	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
168	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4
169	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5
170	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
171	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
172	P	30-39 Tahun	D3	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
174	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
175	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
176	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

					Urusan 3										
177	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
178	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
179	W	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
180	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
181	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
182	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
183	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
184	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
185	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
186	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
187	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4
188	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
189	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4
190	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
191	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4

192	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
193	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
194	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4
195	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
196	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4
197	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4
198	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
199	P	40-49 Tahun	SMP	11-15 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5
200	W	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	3	4	3	4	4	5	4	5	4	5
201	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5
202	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	3	4	3	4	4	5	4	5	4	5
203	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
204	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
205	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

No	JK	Kelompok Usia	LB Pendidikan	Lama Bekerja	Posisi/Jabatan	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5
1	P	40-49 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4
2	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4
3	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4
4	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4
5	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4
6	P	40-49 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5
7	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara	4	4	5	5	5
8	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris	5	4	5	5	5
9	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	4	4
10	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4
11	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5
12	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4
13	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5
14	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	5	5	5	5
15	W	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5

16	P	49 Tahun Keatas	SMA	16 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5
17	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5
18	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	4	5	5
19	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5
20	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5
21	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4
22	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4
23	P	40-49 Tahun	S1	16 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	5	5
24	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	3	3
25	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5
26	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	4	5	5
27	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	4	4	5	4
28	W	49 Tahun Keatas	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4
29	P	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	4	5	4

30	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	4	5
31	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	4	4	5
32	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4
33	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	4	5	4
34	W	20-29 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	3	4	4	4
35	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4
36	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5
37	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	5	5
38	W	40-49 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	4	4	4
39	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	4	4	4
40	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4
41	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	4
42	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5
43	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	4	4	4
44	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	5	4
45	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan	4	5	4	5	4

					2					
46	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	5	4	4	5
47	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Sekertaris Desa	5	4	4	4	4
48	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	5	5	4
49	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	4	4	5
50	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	5
51	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4
52	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4
53	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4
54	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5
55	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	4	4	4	4
56	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	4	4	4	4
57	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	4	4	4	4
58	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	4	4	4	4
59	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	4	4	4	4
60	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Staff	5	4	4	4	4

61	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	5	5
62	P	30-39 Tahun	D3	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5
63	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5
64	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4
65	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4
66	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4
67	p	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	2	4	4	4	4
68	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	3
69	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4
70	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4
71	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	2	4	4	4	4
72	W	40-49 Tahun	D3	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4
73	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5
74	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5
75	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	4	4	5
76	P	40-49 Tahun	SMA	11-15	Kepala Desa	4	5	4	5	4

				Tahun						
77	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4
78	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	5	5	5
79	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	5
80	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	5
81	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	4	4
82	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	5	4	4	5
83	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	5	4	4	5
84	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	5	4	4	5
85	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	5	4	5	5
86	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	5	4	4	5
87	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	5	4	4	5
88	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	5	4
89	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	5
90	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4
91	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	5	5	4

92	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	4	5	4	5
93	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4
94	P	49 Tahun Keatas	SMA	5 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5
95	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	5	5	4	5	5
96	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	4	4	4
97	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4
98	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4
99	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	4	5	5
100	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5
101	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Staff	4	4	4	4	4
102	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4
103	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4
104	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4
105	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4
106	p	40-49 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5
107	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara	5	5	5	5	5

					Desa					
108	W	30-39 Tahun	D3	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5
109	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5
110	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5
111	W	20-29 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5
112	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Desa	5	4	5	5	5
113	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	2	4	3	3	3
114	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5
115	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4
116	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4
117	P	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	4	4	4	4
118	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5
119	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5
120	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5
121	W	30-39 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5
122	P	40-49 Tahun	SMA	11-15	Kepala Urusan	5	5	5	5	5

				Tahun	2					
123	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5
124	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	5
125	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	5	5	5
126	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4
127	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	5	5	5	5
128	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	5
129	P	40-49 Tahun	D3	5 Tahun	Kepala Urusan 3	5	4	5	4	5
130	P	49 Tahun Keatas	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5
131	P	49 Tahun Keatas	S1	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	5	5	5	5
132	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5
133	W	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5
134	P	49 Tahun Keatas	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	5	5	5
135	P	49 Tahun Keatas	SMA	11-15 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	5	5	5
136	P	40-49 Tahun	S1	16 Tahun	Kepala Desa	5	5	5	5	5
137	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara	4	4	4	4	4

					Desa					
138	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4
139	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4
140	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4
141	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4
142	W	20-29 Tahun	D3	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4
143	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	4	5	5
144	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4
145	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	4	5	5
146	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	5	5	2	4	4
147	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Staff	5	5	5	5	5
148	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	5	4	4	5	4
149	P	49 Tahun Keatas	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	5	4	4	5	4
150	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4
151	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4
152	W	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan	4	4	4	4	4

					2					
153	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4
154	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Staff	4	4	4	4	4
155	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4
156	W	30-39 Tahun	S1	6-10 Tahun	Staff	4	4	4	4	4
157	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4
158	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4
159	W	20-29 Tahun	D3	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5
160	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	4	4	4
161	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	5	4	4	5
162	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	5	5	4	4	4
163	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4
164	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4
165	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4
166	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5
167	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4
168	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4

169	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	5	4	4	4	4
170	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	5	5	5	5
171	P	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4
172	P	30-39 Tahun	D3	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4
173	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	5	5	5
174	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4
175	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4
176	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4
177	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4
178	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4
179	W	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4
180	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	4	4	4	4	4
181	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4
182	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4
183	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4
184	P	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4

185	P	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4
186	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4
187	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Sekertaris Desa	5	4	4	4	4
188	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	4	4
189	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4
190	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 3	5	4	4	4	4
191	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	3	4
192	P	40-49 Tahun	SMA	11-15 Tahun	Kepala Desa	4	4	4	4	4
193	W	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	4	4
194	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	4	5	4	5
195	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 1	5	5	5	5	5
196	P	20-29 Tahun	SMA	5 Tahun	Kepala Urusan 2	5	4	4	4	4
197	W	30-39 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	5
198	P	40-49 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4
199	P	40-49 Tahun	SMP	11-15 Tahun	Kepala Desa	5	5	4	5	5

200	W	40-49 Tahun	SMA	6-10 Tahun	Bendahara Desa	4	4	4	3	4
201	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Sekertaris Desa	5	5	4	5	5
202	P	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 1	4	4	4	3	4
203	W	20-29 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 2	4	4	4	4	4
204	P	30-39 Tahun	S1	5 Tahun	Kepala Urusan 3	4	4	4	4	4
205	W	30-39 Tahun	SMA	5 Tahun	Staff	4	4	4	4	4

Lampiran 4

Diagram Model (PLS Algorithm) – Awal

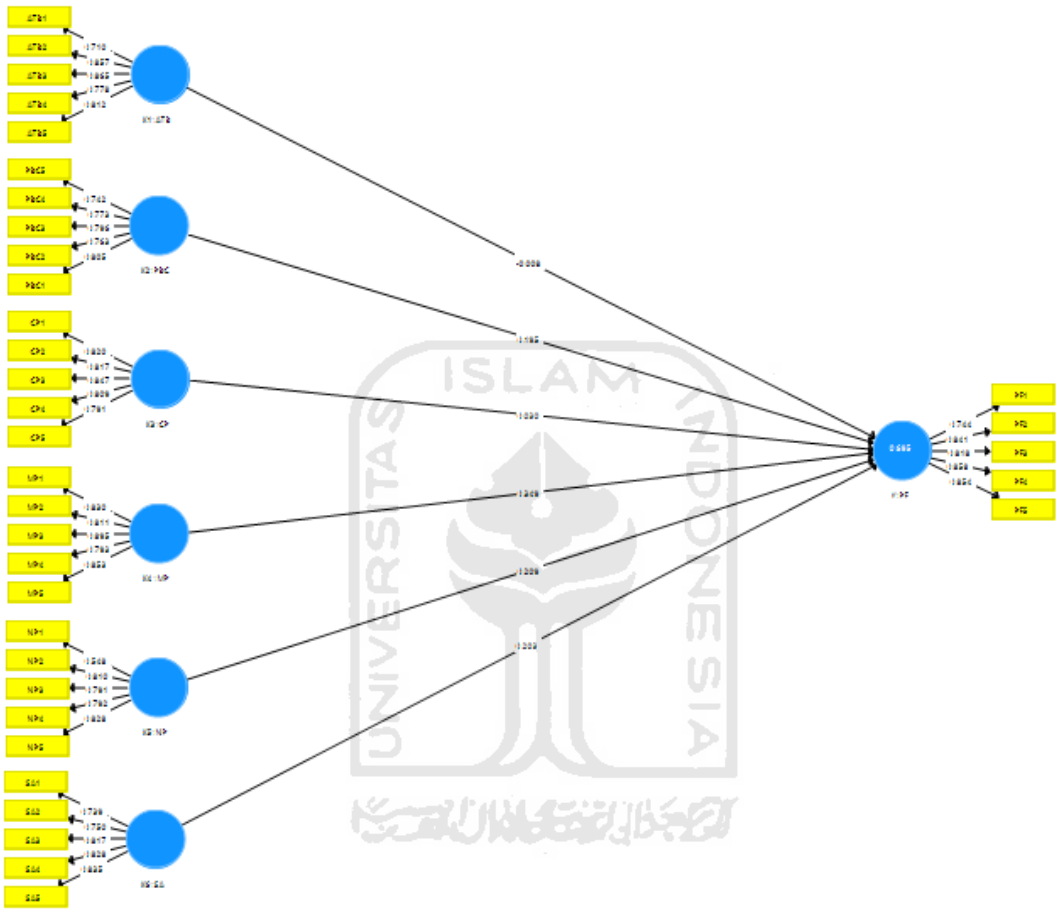

Lampiran 5

Diagram Model (PLS Algorithm) – Akhir

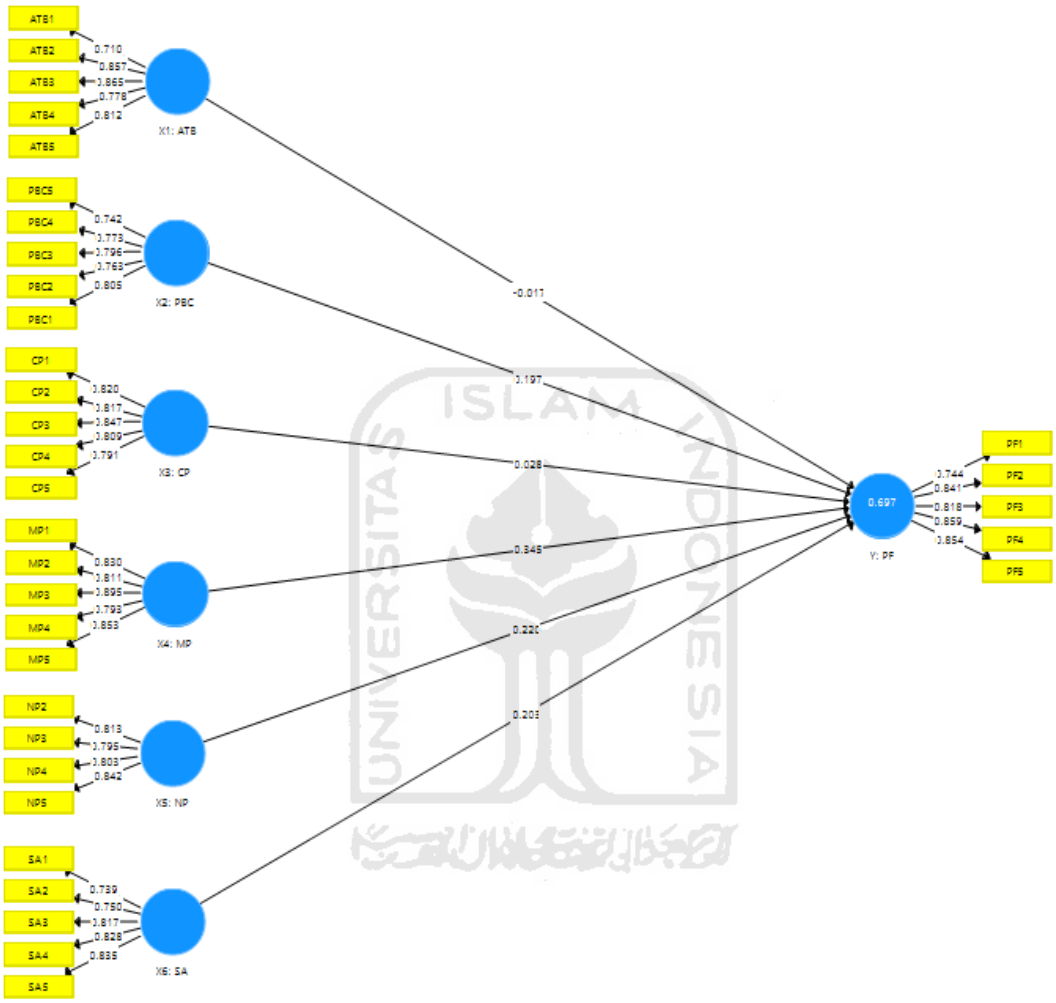

Lampiran 6

Diagram Model (Bootstrapping) Pengujian 1

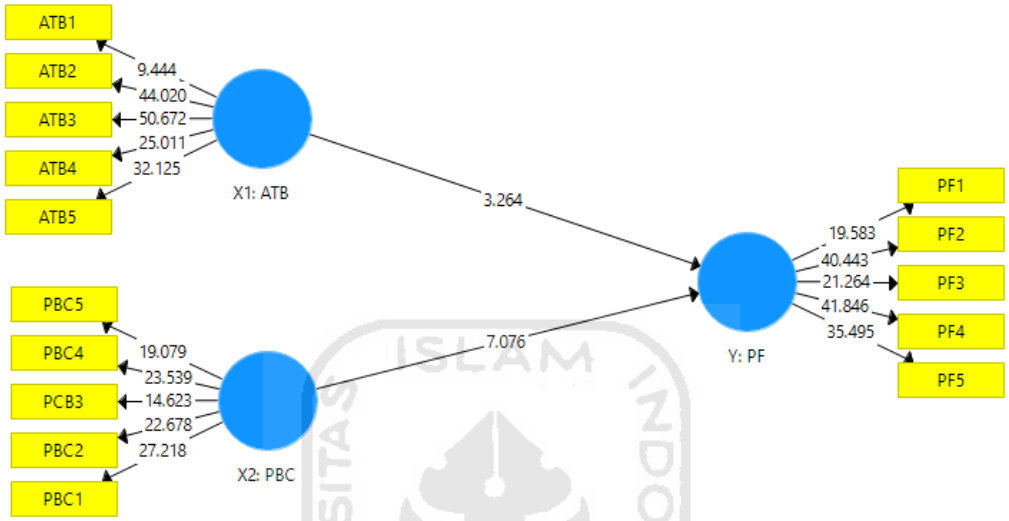

Lampiran 7

Diagram Model (Bootstrapping) Pengujian 2

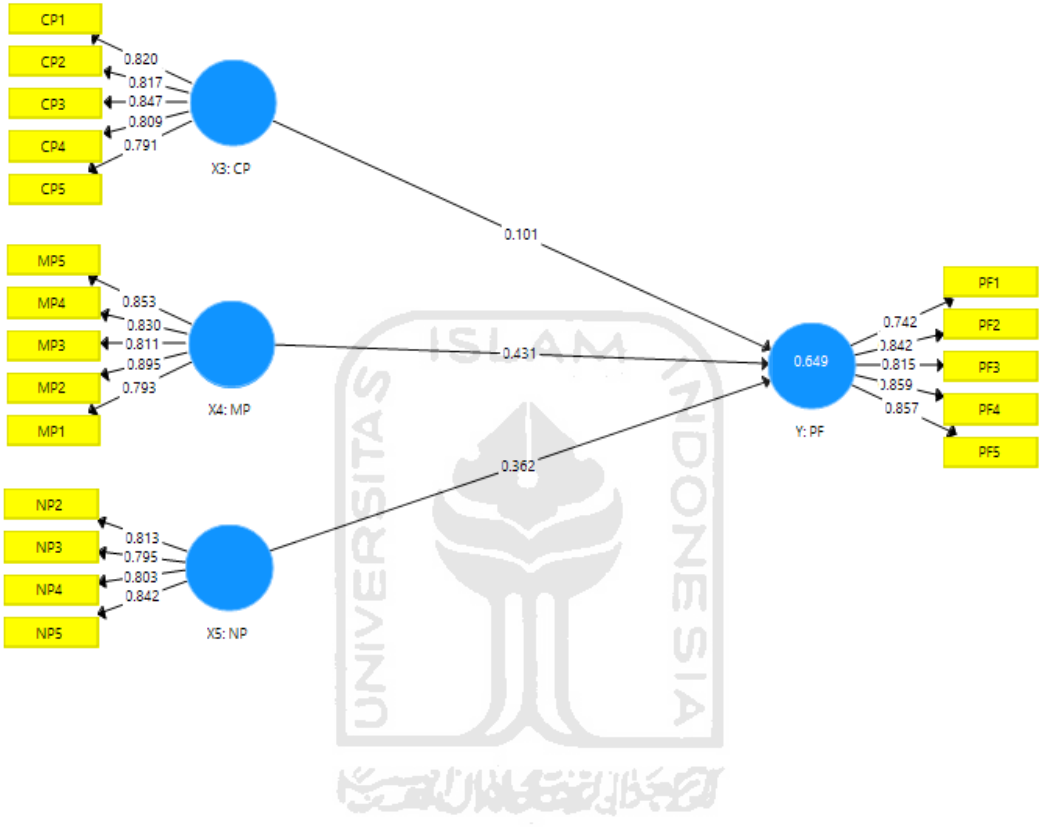

Lampiran 8

Diagram Model (Bootstrapping) Pengujian 3

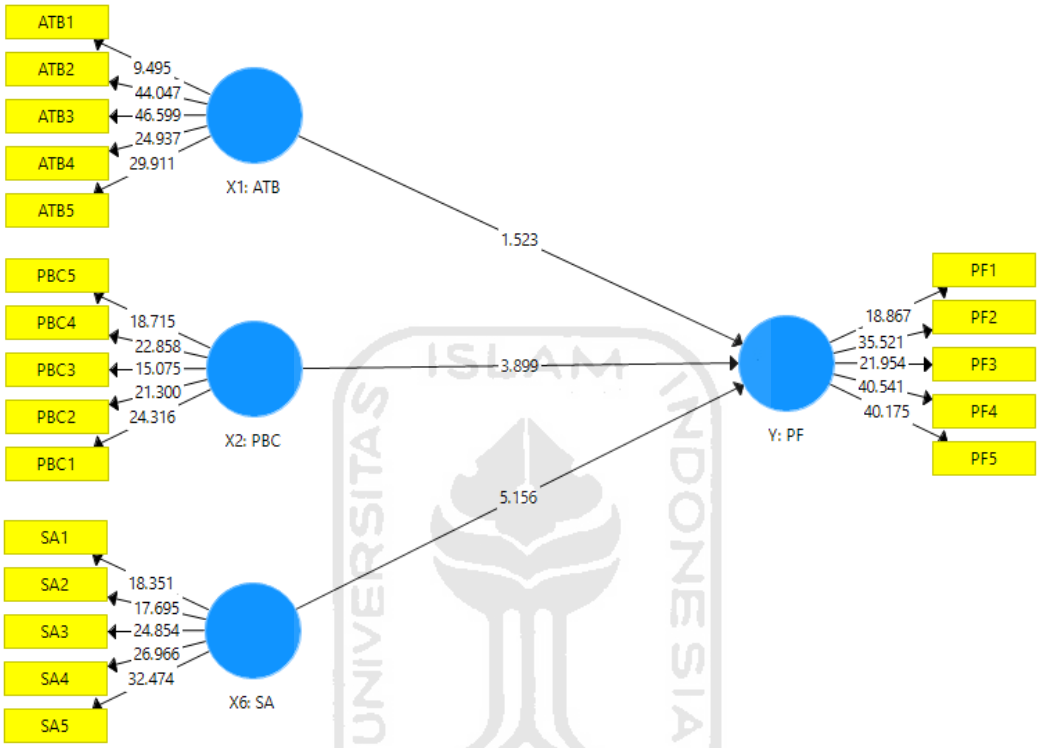

Lampiran 9

Diagram Model (Boostrapping) Pengujian 4

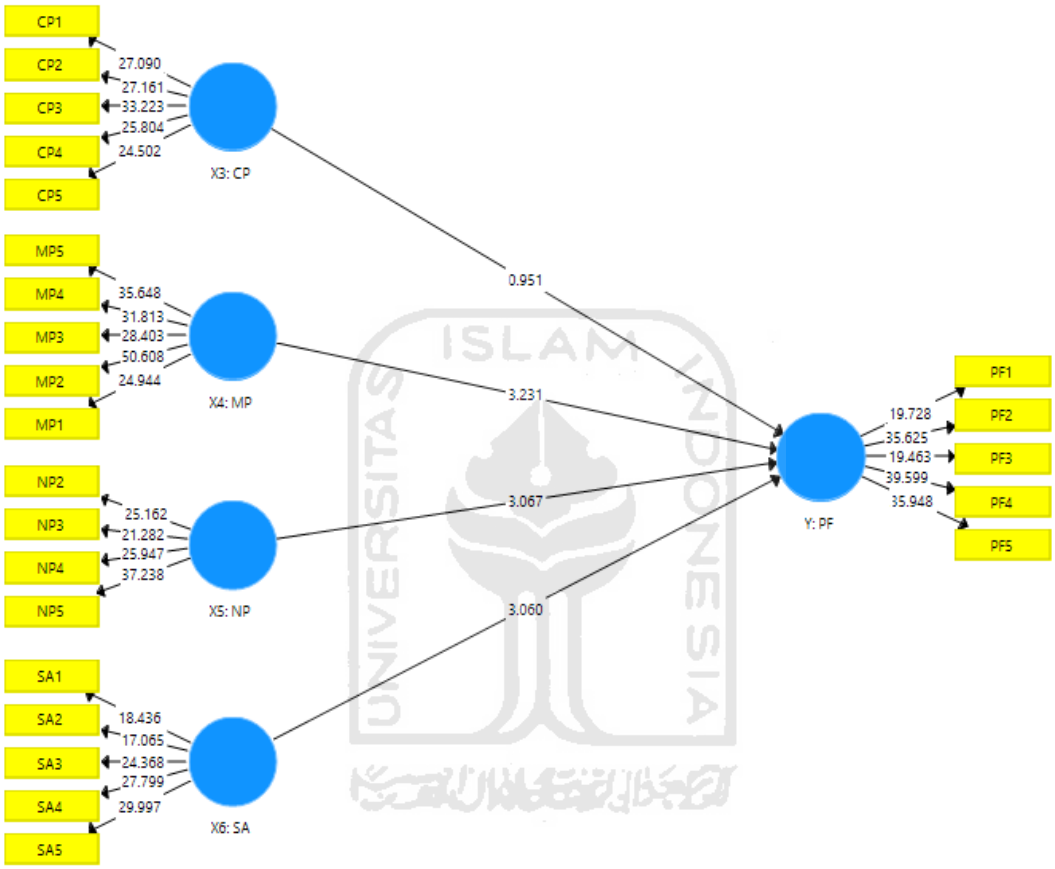

Lampiran 10
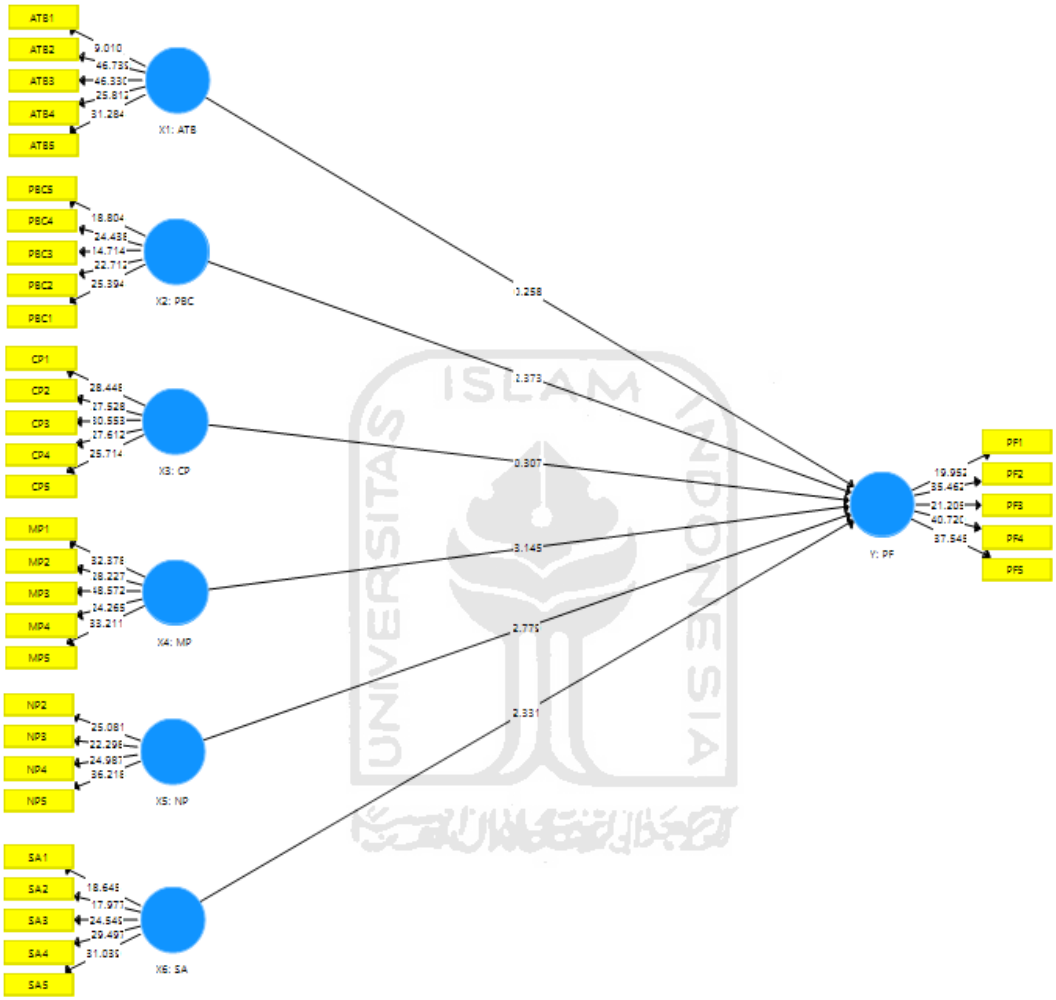
Diagram Model (Bootstrapping) Pengujian 5